

**DAMPAK KRISIS KENAIKAN PERMUKAAN LAUT DI BANGLADESH  
TERHADAP PEREMPUAN PADA 2017-2022 MELALUI TEORI  
EKOFEMINISME  
SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**INAS AINUN SHAFIA**

20323296

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

**DAMPAK KRISIS KENAIKAN PERMUKAAN LAUT DI BANGLADESH  
TERHADAP PEREMPUAN PADA 2017-2022 MELALUI TEORI  
EKOFEMINISME**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**INAS AINUN SHAFIA**

20323296

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

HALAMAN PENGESAHAN

DAMPAK KRISIS KENAIKAN PERMUKAAN LAUT DI  
BANGLADESH TERHADAP PEREMPUAN PADA 2017-2022  
MELALUI TEORI EKOFEMINISME

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.
- 2 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
- 3 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

*Hangga Fathana*  
*Masitoh Nur Rohma*  
*Karina Utami Dewi*

### PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

22 Mei 2024,



---

Inas Annis Shafiq

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	6
<b>1.4 Cakupan Penelitian</b> .....	7
<b>1.5 Tinjauan Pustaka</b> .....	7
<b>1.6 Kerangka Pemikiran</b> .....	10
<b>1.7 Argumen Sementara</b> .....	14
<b>1.8 Metode Penelitian</b> .....	14
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i> .....	14
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i> .....	15
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i> .....	15
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i> .....	15
<b>1.9 Sistematika Pembahasan</b> .....	16
<b>BAB 2 DAMPAK KRISIS KENAIKAN PERMUKAAN LAUT DI BANGLADESH PADA 2017-2022</b> .....	17
<b>2.1 Krisis Kenaikan Permukaan Laut di Bangladesh</b> .....	17
<b>2.2 Dampak Krisis Kenaikan Permukaan Laut Terhadap Keamanan Lingkungan di Bangladesh</b> .....	22
<b>2.3 Dampak Krisis Kenaikan Permukaan Laut Terhadap Sosioekonomi di Bangladesh</b> .....	27
<b>2.4 Dampak Krisis Kenaikan Permukaan Laut Terhadap Politik di Bangladesh</b> .....	31
<b>BAB 3 ANALISIS DAMPAK KRISIS KENAIKAN PERMUKAAN LAUT TERHADAP PEREMPUAN PADA 2017-2022 MELALUI TEORI EKOFEMINISME</b> .....	33
<b>3.1 Analisis Aspek Feminisme Terhadap Krisis Kenaikan Permukaan Laut di Bangladesh</b> .....	33

<b>3.2 Analisis Aspek Alam, Ilmu Pengetahuan, Pembangunan, dan Teknologi Terhadap Krisis Kenaikan Permukaan Laut di Bangladesh ...</b>	<b>41</b>
<b>3.3 Analisis Aspek Perspektif Lokal atau Pribumi Terhadap Krisis Kenaikan Permukaan Laut di Bangladesh .....</b>	<b>46</b>
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>52</b>
<b>4.2 Rekomendasi .....</b>	<b>55</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>56</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan Aplikasi Teori Ekofeminisme dalam Krisis Kenaikan Permukaan Laut di Bangladesh .....	51
---	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Visualisasi Filsafat Ekofeminisme .....	12
---	----



## DAFTAR SINGKATAN

ADB	: Asian Development Bank
AFSP	: Agriculture and Food Security Programme
BCCSAP	: Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan
CcGAP	: Climate Change Gender Action Plan
CEDAW	: Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women
CPP	: Cyclone Preparedness Programme
HSBC	: The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
IUCN	: International Union for Conservation of Nature
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
NAP	: National Adaptation Plan
NASA	: The National Aeronautics and Space Administration
Nbs	: <i>Nature-based solution</i>
NDC	: Nationally Determined Contributions
NPWA	: National Policy for Women's Advancement
PDB	: Produk Domestik Bruto
SDA	: Sumber daya alam
UST	: Unnayan Shahojogy Team
WEF	: World Economic Forum

## ABSTRAK

Krisis kenaikan permukaan laut merupakan permasalahan lingkungan yang berdampak luas pada stabilitas keamanan di Bangladesh. Dampaknya yang dihasilkan tidak terbatas pada sektor lingkungan namun juga ekonomi, sosial politik, hingga perempuan yang ditunjukkan melalui peningkatan kesenjangan gender di Bangladesh. Dalam menganalisis hubungan dampak keduanya, dibutuhkan kerangka pemikiran ekofeminisme oleh Karen J. Warren yang secara khusus membahas keterkaitan keduanya. Terdapat keterkaitan akan krisis kenaikan permukaan laut dan perempuan yang ditunjukkan dari tiga aspek: (1) aspek pertama yakni feminisme yang mengisyaratkan peningkatan peran perempuan terkhusus pada bidang lingkungan; (2) aspek alam—ilmu pengetahuan terutama ekologi, pembangunan, dan teknologi yang saling berkaitan untuk menciptakan pembangunan yang ekologis, humanis, dan berkelanjutan; (3) aspek perspektif lokal dan pribumi yang menyoroti peran perspektif masyarakat lokal atau pribumi yang bersifat adaptif dan efektif. Melalui penelitian ini ditemukan aspek-aspek ekofeminisme dalam menanggapi krisis kenaikan permukaan laut di Bangladesh meski masih perlu perkembangan terutama pada implementasi dan komitmen seluruh aktor yang terkait.

**Kata-kata kunci:** Kenaikan permukaan laut, Bangladesh, Ekofeminisme, Perempuan, Kesenjangan gender

## ABSTRACT

*Sea level rise crisis is an environmental issue that has a large impact to the stability of Bangladesh. Its impact is not limited to the environmental sector but also to the economy, social-politics, and even to the women in Bangladesh which is shown by the increasing gender gaps in Bangladesh. To analyze the connection between both sides, ecofeminism philosophy by Karen J. Warren will be applied because it discusses the connection between both sides specifically. There is a connection shown by the three aspects of ecofeminism, which are (1) feminism, suggest increasing the women participation especially in environmental sector; (2) nature, science (especially ecology), development, and technology that interconnected to create ecological, humanist, and sustainable development; (3) local and indigenous perspective which highlight the adaptive and effective role of local and indigenous society approach. Through this research, aspects of ecofeminism were found in responding to sea level rise crisis in Bangladesh although there is still need an improvement especially to the implementation and commitment from all the related actors.*

**Keywords:** *Sea level rise, Bangladesh, Ecofeminism, Women, Gender gap*

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada perkembangan internasional, terdapat transformasi pada konsep vital yakni keamanan dalam menjawab kompleksitas permasalahan yang juga meningkat. Konsep keamanan yang pada era sebelum Perang Dingin cenderung menggunakan pendekatan sempit yang membatasi pemusatan kepentingan pada negara serta aspek *high politics* yang berbeda dengan pasca Perang Dingin yang menghadirkan aktor selain negara dan aspek seperti pangan, lingkungan, hingga komunitas (Baldwin A. 1997). Konsep keamanan saat ini mengakui adanya permasalahan yang secara tidak langsung menyerang kelompok masyarakat tertentu sebagai suatu permasalahan yang sama pentingnya untuk diselesaikan. Salah satu daripada itu adalah permasalahan ketimpangan gender yang kini dihadapi hampir seluruh negara di dunia.

Isu ketimpangan gender menjadi permasalahan serius yang didefinisikan sebagai adanya pandangan dan perlakuan berbeda terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam lingkup kehidupan secara menyeluruh termasuk politik, ekonomi, budaya, hingga hukum. Terkait hal ini, World Economic Forum (WEF) yakni Global Gender Gap Index melakukan identifikasi terhadap isu ketimpangan gender dan menghasilkan adanya empat kategori yang mempengaruhi isu ketimpangan gender, antara lain peluang dan partisipasi ekonomi, pencapaian pendidikan, pemberdayaan politik, serta kesehatan dan kelangsungan hidup (Leopold, Ratcheva, and Zahidi 2017). Keempat kategori yang merupakan representasi hak dasar manusia menjadi tolok ukur yang penting dalam menentukan

posisi suatu negara pada isu gender. Indeks Global Gender Gap juga mengukur perbedaan-perbedaan perlakuan berbasis gender terlepas dari pendapatan ekonomi suatu negara dengan dimuat melalui persentase yang mana semakin tingginya besaran skor maka menentukan semakin besarnya performa negara dalam menempuh kesenjangan.

Dari keempat kategori dalam isu ketimpangan gender yang telah disebutkan, seluruhnya masih menjadi permasalahan yang mudah ditemukan di negara Bangladesh. Ketimpangan gender di Bangladesh menjadi permasalahan signifikan yang semakin dibuktikan dengan laporan pada indeks Global Gender Gap yang telah dikeluarkan WEF tiap tahunnya. Pada 2017, Bangladesh menempati peringkat ke-47 dan besaran skor 0,719 (Leopold, Ratcheva, and Zahidi 2017). Bangladesh mengalami penurunan pada tahun berikutnya yang menjadikan Bangladesh menempati peringkat ke-48 dengan skor 0,721 (*The Global Gender Gap Report 2018* 2018). Bangladesh kembali mengalami penurunan mencapai skor 0,726 yang membuatnya berada pada peringkat ke-50 disusul pada tahun berikutnya yang menempati peringkat ke-65 dengan skor 0,719 hingga temuan data terbaru pada 2022 yang menunjukkan Bangladesh menempati peringkat ke-71 dengan skor 0,714 (World Economic Forum 2022).

Bila merujuk pada laporan Global Gender Gap, terdapat penurunan signifikan yang dialami oleh Bangladesh terkait performa dalam menutup adanya paritas berbasis gender dari enam tahun terakhir dimana penyebabnya tidak terlepas pada persoalan sistem atau struktur pada pemerintah dan kultur pada masyarakat yang patriarki di Bangladesh. Pada lingkup peluang dan partisipasi ekonomi, perempuan di Bangladesh masih memiliki rata-rata persentase yang jauh lebih

rendah daripada laki-laki dalam aksesnya terhadap pekerjaan yakni 30,08% sedangkan 85% untuk laki-laki (The Global Economy 2023). Mayoritas pekerja perempuan di Bangladesh masih terbatas pada pekerjaan informal seperti buruh dengan upah yang kecil yang tidak dapat menjamin kesejahteraan secara finansial maupun sosial karena tidak adanya jaminan akan pemberian cuti maupun insentif (Concern Worldwide 2022). Selain pada lingkup peluang dan partisipasi ekonomi, pemberdayaan politik masih menjadi persoalan yang tidak secara signifikan mengalami perubahan di Bangladesh. Meski telah terdapat peran perempuan dalam kontestasi politik di Bangladesh, unsur patriarki masih kental yang mana terlihat dari keterbatasan hak suara politik bagi perempuan.

Patriarki sebagai faktor penyebab kesenjangan gender di Bangladesh tentunya tidak hanya ditemukan pada ranah struktural namun juga dengan mudah ditemukan pada kultural yang bersangkutan pada norma budaya yang diterapkan di masyarakat. Masyarakat di Bangladesh masih memiliki anggapan kuat tentang derajat perempuan di masyarakat yang meletakkan perempuan di bawah laki-laki. Bentuk diskriminasi seperti subordinasi kelas, penindasan, eksploitasi, hingga kekerasan berbasis gender masih sangat berkaitan dengan budaya masyarakat di Bangladesh (Md. Sohrab Hossen 2020). Hal ini didukung dari temuan masih rendahnya akses pendidikan bagi perempuan sebab pandangan patriarki yang menempatkan perempuan untuk berfokus pada persoalan domestik dan mendorong adanya pernikahan dini yang beresiko lebih besar untuk membuat perempuan mengalami eksploitasi hingga kekerasan dalam rumah tangga.

Kondisi kesenjangan gender selama enam tahun terakhir semakin diperparah sebab persoalan lainnya yang telah terjadi sejak lama di Bangladesh

yakni adanya kenaikan terhadap permukaan laut. Kenaikan permukaan laut berkontribusi pada ketimpangan gender di Bangladesh melalui penutupan akses terhadap kebutuhan dasar yang dapat diwakilkan melalui keempat kategori tersebut. Mengutip dari NASA (2022), kenaikan permukaan laut global merupakan fenomena yang disebabkan oleh dua hal yakni pencairan gletser dan laut yang mengambang dimana muara pada faktor ini adalah kenaikan suhu atau perubahan iklim tersebut. Dalam mengukur kenaikan permukaan laut, diperlukan konsep yang dikenal sebagai *Mean Sea Level* atau permukaan laut dalam rata-rata global dengan pengawasan melalui altimetri satelit yang menghitung kenaikan permukaan laut secara global (NASA, n.d.). Penelitian mengenai kenaikan permukaan laut yang dimulai pada 1993 hingga 2022 memperkirakan terdapat peningkatan sebesar 101 ( $\pm 4,0$ ) milimeter dengan rata-rata kenaikan sebesar 3,4 millimeter per tahunnya (Lindsey 2022). Kenaikan permukaan laut berdampak signifikan terhadap daerah pesisir atau dikatakan rawan secara geografis meski peningkatan terhadap kenaikan permukaan laut kecil angkanya sebab potensi terdampak banjir sebagai konsekuensinya juga meningkat.

Bangladesh adalah negara yang terletak di Kawasan Delta dari Sungai Gangga dan Brahmaputra dan dilintasi Sungai Padma dari Himalaya dan Sungai Meghna yang mana sebagian besar daratan Bangladesh terletak 12 meter di bawah permukaan laut sehingga rentan terkena banjir saat pencairan lapisan es meningkat (Asian Development Bank 2021). Pada 2014, setidaknya 17% daratan di Bangladesh diperkirakan akan tenggelam memasuki 2050 dan dapat lebih buruk lagi melihat belum adanya penurunan terhadap kenaikan muka air laut hingga saat ini (Harris 2014). Bangladesh mengalami kenaikan permukaan laut di daerahnya

pada estimasi 0,5 mm hingga 1,4 mm. Akibatnya, sebesar 31% hingga 40% dari lahan pertanian di Bangladesh harus terganggu bahkan tidak lagi dapat dimanfaatkan. Meski dampak kenaikan permukaan laut di Bangladesh dapat membahayakan negara tersebut secara keseluruhan namun area pesisir yang merupakan letak delta sungai tropis dan subtropis dimana sedimen dan saluran air tempat sungai bertemu dengan laut menjadi yang area paling terdampak baik itu di bagian timur yakni Bodormokam, bagian tengah meliputi Sundarban yang diantaranya adalah Distrik Noakhali, Barisal, Bhola dan Patuakhali, dan bagian wilayah barat yang diisi oleh Distrik Khulna dan sebagian Patukhuali (Sarwar 2013). Selain dampak kenaikan permukaan laut yang membayang-bayangi pemerintah Bangladesh dalam persoalan tata kelola di masyarakatnya, kenaikan permukaan laut juga berdampak buruk terhadap persoalan domestik atau rumah tangga di masyarakat. Selama kurun waktu 25 tahun terakhir, pertanian di Bangladesh terhambat karena air yang masuk dalam jumlah besar dan menggenang di sebagian besar lahan pertanian di Bangladesh. Setidaknya terdapat 20 juta masyarakat Bangladesh harus kehilangan pekerjaan dan melakukan bermigrasi untuk mendapatkan pekerjaan lebih layak (NRDC 2018). Kenaikan permukaan laut juga mengkhawatirkan bagi anak-anak yang terdampak karena kesulitan dalam menanggapi bencana (Ho 2022).

Ketidakamanan yang mengancam aktivitas masyarakat membuat pengelolaan rumah tangga tidak stabil yang menambah beban bagi perempuan karena pengelolaan rumah tangga yang dipusatkan pada perempuan (Bagri 2017). Dalam mengelola rumah tangga, perempuan mengemban kesulitan akan mengakses layanan dasar karena infrastruktur yang mengganggu jaringan listrik hingga akses

terhadap sumber air bersih karena adanya kenaikan permukaan laut yang mengirimkan air asin ke daratan Bangladesh dan menghambat akses air bersih yang diperlukan sebagai kebutuhan dasar untuk aktivitas rumah tangga mulai dari mencuci hingga memasak atau untuk dikonsumsi. Perempuan di Bangladesh setiap harinya menempuh jarak sekitar 5 kilometer untuk mendapatkan pasokan air bersih (Bagri 2017). Selain itu, terbatasnya pasokan air bersih juga berpengaruh pada kebutuhan sanitasi perempuan terutama pada masa menstruasi. Akibatnya, perempuan di Bangladesh memilih untuk menggunakan kain yang tidak terjamin kebersihannya bahkan beberapa memilih untuk menghentikan menstruasi dengan meminum obat yang tentunya berbahaya pada kesehatan di jangka panjang (Rezwan 2022).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana krisis kenaikan permukaan laut pada 2017-2022 berdampak terhadap posisi perempuan di Bangladesh?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Riset ini memiliki tujuan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Menganalisis faktor-faktor yang menjelaskan kondisi perempuan sebagai aktor yang terdampak dalam krisis kenaikan permukaan laut di Bangladesh menggunakan teori ekofeminisme,
2. Memberikan penjelasan mendalam akan keterkaitan alam semesta dan perempuan dalam tata kelola global melalui studi kasus krisis kenaikan permukaan laut di Bangladesh menggunakan teori ekofeminisme,



3. Memberikan elaborasi dampak yang dihasilkan oleh krisis kenaikan permukaan laut terhadap perempuan di Bangladesh melalui teori ekofeminisme.

#### **1.4 Cakupan Penelitian**

Riset ini berfokus pada analisis ekofeminisme dalam implikasi krisis kenaikan permukaan terhadap posisi perempuan di wilayah yang paling terdampak di Bangladesh sebagai negara paling rentan yang terdampak kenaikan permukaan laut melalui pendekatan kualitatif. Pemilihan rentang waktu adalah 2017 hingga 2022 dengan pertimbangan adanya kesenjangan gender di Bangladesh yang ditujukan pada skor 0,719 di 2017 dan kenaikan pada 2018 sebesar 0,721 yang belum menurun secara signifikan hingga 2022 yang ditujukan pada skor 0,714. Pemilihan pada 2017-2022 juga selaras dengan permasalahan kenaikan permukaan laut yang hingga pada 2022 masih mencapai 101 ( $\pm 4,0$ ) milimeter.

Hasil dari penelitian adalah penjelasan dampak-dampak yang dihasilkan krisis kenaikan permukaan laut, permasalahan kesenjangan gender di Bangladesh, dan keterkaitan dampaknya terhadap perempuan di Bangladesh melalui variabel dalam teori ekofeminisme.

#### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Terdapat beberapa karya ilmiah terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dan digunakan sebagai tinjauan pustaka. Adapun beberapa karya ilmiah yang dimuat sebagai tinjauan pustaka, antara lain:

Pertama, Emma Annabelle Welden (2019) menjawab hukum yang efektif dalam mengaktualisasikan perubahan bagi lingkungan dan perempuan melalui metode kritik ekofeminisme. Dalam literatur ini, pembahasan berdasarkan pada permasalahan perundang-undangan internasional mengenai perempuan dan lingkungan yang mengalami stagnansi pada hukum yang bersifat lunak dengan mengambil objek penelitian Agenda 21, *The Beijing Declaration Platform for Action*, dan Pernyataan Dublin mengenai Air dan Pembangunan Berkelanjutan dalam studi kasus sengketa air sebagai sumber daya di Bangladesh dan Ghana. Adapun hasil dari penelitian ini adalah wawasan yang diperlukan dalam menyusun hukum mengenai perempuan dan lingkungan untuk menghilangkan stagnansi pada hukum lunak menjadi ruang produktif dan inklusif bagi perempuan dan lingkungan (Welden 2019).

Kedua, Mohammed Golam Mahabub Sarwar (2013) yang memusatkan pada pembahasan mengenai kemungkinan dampak terhadap wilayah pesisir, lahan pertanian dan perkebunan, pemukiman hingga keamanan internasional akibat kenaikan permukaan laut di Bangladesh serta upaya yang dapat dilakukan dalam konteks domestik maupun global. Melalui pertanyaan kunci tersebut terdapat temuan bahwa adanya dampak pada pilihan penghidupan masyarakat di wilayah pesisir, ketahanan pangan, dan terganggunya ekosistem paling penting yaitu Hutan Bakau Sundarbans serta dijelaskan juga upaya yang dapat dilakukan melalui mitigasi dan adaptasi yang merupakan gabungan dari peran pemerintah Bangladesh, masyarakat Bangladesh, hingga komunitas internasional.

Ketiga, Carlos A. Catros Ortiz (1994) yang mengkaji dampak dari kenaikan permukaan laut global terhadap Bangladesh dalam aspek sosial ekonomi yang

menghasilkan indikasi langkah yang dapat diadopsi untuk mengurangi kerugian serta membantu Bangladesh dalam mempersiapkan adanya kenaikan permukaan laut (Ortiz 1994).

Keempat, Margaret Alston (2015) yang membahas tentang dampak perubahan iklim yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan seperti terjadinya kekeringan, kenaikan permukaan laut, dan erosi lembah sungai di Bangladesh. Perubahan iklim menghasilkan resiko yang berimbas pada kehidupan masyarakat di Bangladesh seperti kehilangan mata pencaharian dan kemiskinan yang ekstrem. Melalui fenomena ini Alston meneliti dampak pada strategi penghidupan dan hubungan gender karena adanya pertentangan dimana perempuan yang memiliki peran penting untuk terlibat dengan masyarakat dalam mengatasi dampak perubahan iklim namun pada praktik budaya sering bertentangan karena masih adanya permasalahan ketimpangan gender di negara Bangladesh. Selanjutnya, penelitian berfokus untuk mengemukakan saran kebijakan yang dapat memberikan pengakuan terhadap kontribusi perempuan dan bersifat dukungan terhadap kesetaraan gender dalam mengoptimalkan strategi adaptasi global terhadap perubahan iklim (Alston 2015, 162).

Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka yang ditemukan adanya titik persamaan pada latar belakang masalah yang diangkat yaitu adanya perubahan iklim yang mengakibatkan terjadinya kenaikan permukaan laut global secara signifikan serta objek penelitian pada negara Bangladesh. Meski adanya penelitian dalam menjelaskan dampak kenaikan permukaan laut terhadap Bangladesh namun belum didapati skema penelitian yang memberikan hasil penelitian memusatkan pada dampak terhadap lingkungan dan perempuan sebagai aktor yang menerima

kerugian terbesar dengan metode pendekatan ekofeminisme. Dalam penelitian sebelumnya yang membahas dampak kenaikan permukaan laut global juga terbatas pada 2016 sehingga penelitian ini akan mengangkat kurun waktu 2017 hingga 2022 untuk memberikan kebaruan serta diangkat melalui sudut pandang feminisme dalam menjelaskan dampak dari fenomena kenaikan permukaan laut pada kurun waktu tersebut.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini pokok permasalahan yang telah dimuat dapat dijawab dengan menggunakan teori ekofeminisme atau konsep yang menjelaskan keterkaitan peran lingkungan dan perempuan.

Mengutip dari Karen Joyce Warren, seorang pakar ekofeminisme, menjelaskan ekofeminisme yang merupakan penggabungan dari konsep ekologi dan feminisme memiliki klaim utama akan adanya hubungan penting antara dominasi merugikan perempuan dan dominasi yang tidak dapat dibenarkan terhadap alam (Warren 2000, 1). Melalui slogan “alam sebagai permasalahan feminin” ekofeminisme mengidentifikasi permasalahan lingkungan dan segala yang berhubungan dengan ketidakadilan hingga diskriminasi adalah permasalahan feminin karena mampu membantu memahami penindasan, subordinasi, dan diskriminasi yang dialami perempuan (Warren 2000, 1).

Analisis ekofeminisme menggunakan gender sebagai pengkategorian yang memfokuskan pada perempuan yang dapat menjelaskan lapisan gender atas sistem dominasi manusia seperti bagaimana perempuan menjadi pihak yang menderita resiko kerusakan lingkungan lebih tinggi dari laki-laki, tumpang tindih peran

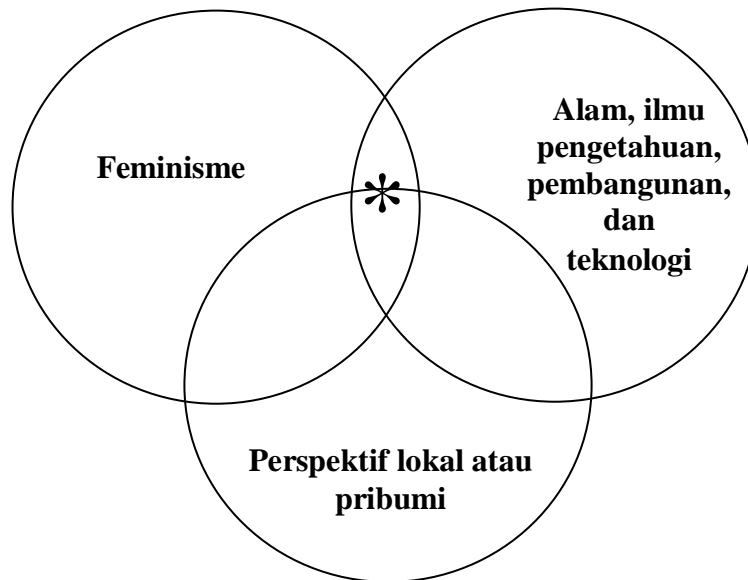
perempuan dari pekerjaan dan beban rumah tangganya, dan konsepsi lingkungan yang telah bias pada peran laki-laki.

Warren mengidentifikasi hubungan perempuan dan lingkungan dalam sepuluh kategori yang menjadi dasar konsep ekofeminisme (Warren 2000, 21-38). Pertama, terdapat hubungan historis yang bersifat kausal dimana terdapat bentuk perlawanan yang sama terhadap patriarki dan tindakan yang disebabkan seperti perampasan hak atau penghinaan yang dialami perempuan maupun lingkungan. Kedua, hubungan konseptual yakni peran perempuan dalam reproduksi yang sama dengan lingkungan dalam perannya sebagai konstruksi kehidupan manusia. Ketiga, hubungan empiris atau hubungan kesamaan perempuan dan lingkungan dalam mengalami kerusakan karena penempatan sebagai kelompok atau sektor yang lemah.

Keempat, hubungan sosioekonomi yang membahas tentang eksploitasi yang dialami perempuan mulai dari eksploitasi terhadap tubuh hingga pekerjaan perempuan yang mana terjadi juga terhadap lingkungan karena adanya asumsi yang bias terhadap laki-laki dan dominasi maskulin. Kelima, hubungan linguistik yang membahas peran penggunaan bahasa dalam menciptakan pandangan terhadap perempuan ataupun lingkungan seperti penggunaan istilah Ibu Pertiwi yang diberikan pada alam yang bersifat feminin. Keenam, hubungan simbolik dan sastra yang membahas peran penting penggambaran melalui sastra dan berkembang pada budaya populer tentang perempuan dan alam seperti tokoh *Snow White* sebagai putri yang berteman dengan binatang menunjukkan kedekatan perempuan dengan alam.

Ketujuh, hubungan spiritual dan religius mengenai peran sebuah kepercayaan maupun agama dalam mewariskan budaya patriarki melalui piramida dominasi dan status yang bersifat hierarkis maupun pandangan lain yang menganggap ekofeminisme sebagai gerakan spiritual karena mencakup dimensi yang menantang pemahaman terhadap nilai yang kita yakini. Kedelapan, hubungan epistemologi yang membahas tentang pengetahuan dengan menguji objektivitas pandangan Barat sebagai pandangan yang menganggap alam dan perempuan sebagai konsepsi studi yang pasif. Kesembilan, hubungan politik yang menunjukkan peran perempuan dalam revolusi ekologis hingga membentuk ekofeminisme sebagai gerakan sosial yang memiliki peran dalam politik. Terakhir, hubungan etis yakni peran perempuan dan lingkungan dalam memberikan tanggapan, sikap, hingga perawatan terhadap keduanya secara berkesinambungan. Melalui keterikatan kuat ini ekofeminisme meyakini bahwa permasalahan yang dihadapi keduanya juga berkaitan dan tidak dapat diselesaikan secara terpisah.

**Gambar 1. Diagram Visualisasi Filsafat Ekofeminisme**



Sumber: (Warren 2000, 44)

Melalui diagram di atas dijelaskan filsafat atau prinsip ekofeminisme mencakup ketiga bidang yang penting dalam menjelaskan masalah perempuan dan lingkungan yang saling berhubungan antara lain:

1. Feminisme (segala isu mengenai perempuan);
2. Alam, ilmu pengetahuan terutama mengenai ekologi, pembangunan, dan teknologi; dan
3. Perspektif lokal atau pribumi.

Diagram ini juga menjelaskan cakupan praktik atau kebijakan yang didukung ekofeminisme yakni yang telah sesuai dengan prinsip ekologis maupun feminisme. Dengan demikian, praktik patriarki atau sistem dominasi terhadap perempuan oleh laki-laki (atau segala yang teridentifikasi bersifat maskulin) melalui institusi (kebijakan, praktik, dan peran), perilaku, dan cara berpikir dengan memberikan hak

istimewa, nilai, dan kekuasaan lebih daripada perempuan akan ditentang oleh ekofeminisme karena tidak lagi termasuk pada cakupan prinsipnya.

## **1.7 Argumen Sementara**

Krisis kenaikan permukaan laut di Bangladesh pada 2017-2022 berdampak terhadap posisi perempuan Bangladesh yang dijelaskan melalui pendekatan penyelesaian yang tertera pada aspek-aspek ekofeminisme mulai dari aspek feminisme yang mengimplikasikan perlunya peran perempuan yang setara baik melalui representasi di kebijakan nasional maupun inisiatif dalam menanggapi krisis kenaikan permukaan laut. Kedua, terdapat aspek alam, ilmu pengetahuan terutama ilmu ekologi, pembangunan, dan teknologi yang menunjukkan perlunya peran ilmu ekologi dan pengetahuan ilmiah serta pembangunan yang ekologis, humanis, dan berkelanjutan dapat didukung dari peran lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Ketiga, aspek perspektif lokal atau pribumi yang mengharapkan dapat diakuinya peran penting perspektif masyarakat lokal atau pribumi yang bersifat adaptif dan efektif dengan keunikan berbeda di tiap wilayah.

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan basis studi kepustakaan yang menekankan penggabungan data terkait kenaikan permukaan laut di Bangladesh melalui teori ekofeminisme untuk mencapai tujuan-tujuan penelitian.



### 1.8.2 *Subjek dan Objek Penelitian*

Subjek penelitian yang diambil adalah perempuan di wilayah yang paling terdampak di Bangladesh sebagai negara paling rentan yang terdampak kenaikan permukaan laut sedangkan objek penelitian adalah dampak dari kenaikan permukaan laut terhadap perempuan di wilayah yang paling terdampak di Bangladesh sebagai negara paling rentan yang terdampak kenaikan permukaan laut.

### 1.8.3 *Metode Pengumpulan Data*

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode pengumpulan studi literatur yang mengutamakan data sekunder antara lain:

a. Buku

Kajian literatur dalam bentuk buku yang digunakan salah satunya *Ecofeminist Philosophy: A Western Perspective on What It Is and Why It Matters*.

b. Jurnal

Penelitian merujuk pada *Ethics & the Environment* serta beberapa artikel jurnal yang relevan.

c. Artikel

Artikel daring yang dirilis oleh media massa lokal maupun internasional juga dibutuhkan dalam mendapat informasi yang aktual.

d. Laporan

Laporan-laporan yang memuat data kredibel oleh lembaga terverifikasi seperti The Global Gender Gap Report pada 2017-2022.

### 1.8.4 *Proses Penelitian*

Proses penelitian dilakukan dengan riset terhadap fenomena kenaikan permukaan laut. Riset dilakukan dengan mengumpulkan literatur terkait dan

menghubungkannya dengan teori ekofeminisme dan mengumpulkan data sekunder sebagai penunjang proses penelitian.

## **1.9 Sistematika Pembahasan**

Pada penelitian ini, akan memuat Bab satu yang mencakup pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua akan membahas mengenai konteks yakni Bangladesh dengan memaparkan masalah dan memberikan uraian kondisi negara Bangladesh dalam aspek sosial, politik, demografi, geografi, serta lini masa fenomena kenaikan permukaan laut.

Bab tiga akan memberikan analisis masalah sesuai data mengenai kondisi Bangladesh selama kurun waktu 2017-2022 dengan mengaplikasikan teori ekofeminisme.

Bab empat akan memuat kesimpulan yang berisi ringkasan dari hasil analisis dalam penelitian serta memberikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya.

**BAB 2**  
**DAMPAK KRISIS KENAIKAN PERMUKAAN LAUT DI BANGLADESH**  
**PADA 2017-2022**

Pada bagian ini, pembahasan akan terbagi atas empat bagian mulai dari penjelasan mengenai krisis kenaikan permukaan laut di Bangladesh pada 2017-2022 yang ditujukan untuk mengeksplorasi faktor pemicu terjadinya krisis pada selama periode lima tahun tersebut dilanjutkan dengan pembahasan mengenai dampak akan sektor yang berkaitan dengan beberapa kategori hubungan perempuan dan lingkungan yang dijelaskan teori ekofeminisme yakni hubungan konseptual dan empiris pada penjelasan dampak terhadap keamanan lingkungan, hubungan sosioekonomi pada dampak terhadap sosioekonomi, dan hubungan politik pada dampak terhadap politik.

**2.1 Krisis Kenaikan Permukaan Laut di Bangladesh**

Fenomena kenaikan permukaan laut yang telah terjadi sejak abad ke-19 dan mengalami laju kenaikan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir hingga menyebabkan krisis di Bangladesh didorong oleh berbagai faktor pemicu. Faktor pemicu ini berasal dari skala yang berbeda—global dan lokal meski keduanya saling berkaitan.

Pada faktor pemicu di skala global, perubahan iklim menjadi faktor pemicu yang paling menentukan dinamika perkembangan kenaikan permukaan laut di Bangladesh. Berdasarkan indeks risiko iklim global pada 2018, Bangladesh menempati peringkat keenam sebagai negara yang paling mengalami resiko akibat

perubahan iklim (David Eckstein 2016). Perubahan iklim telah menjadi masalah di tingkat global karena dampak yang dihasilkan bergerak melewati batasan-batasan negara baik secara langsung maupun pada waktu tertentu. Perubahan iklim terbentuk atas serangkaian proses yang kompleks dimana dalam mempengaruhi kenaikan permukaan laut proses ekspansi termal dan pencairan gletser menjadi yang paling menentukan.

Ekspansi termal dikenal juga peristiwa pemuaiian panas air yaitu proses peningkatan suhu global dan penghangatan air laut hingga menjadikannya mengembang (NASA n.d.). Ekspansi termal menjadi lebih membahayakan bila berlangsung pada area laut yang lebih dalam meskipun dengan pasokan panas yang sama karena menyebabkan pengembangan yang lebih besar sehingga peningkatan permukaan laut juga menjadi lebih tinggi (NASA n.d.). Ekspansi termal yang terbentuk atas pemuaiian panas yang diperoleh dari lautan ini juga ditandai dari terjadinya gelombang panas yang meningkat pada 2017 sebagai salah satu tahun terpanas yang pernah tercatat hingga berimplikasi pada pola iklim di Bangladesh (ReliefWeb 2017). Mengutip dari World Bank (2021), kenaikan suhu rata-rata yang terjadi di Bangladesh secara umum selaras dengan rata-rata global. Ketika kenaikan suhu rata-rata global yang tercatat pada periode 2017 mencapai  $0,47^{\circ}\text{C}$  lebih besar dari periode 2010, suhu rata-rata di Bangladesh pada yang sama mencapai  $40,6^{\circ}\text{C}$  yang merupakan suhu tertinggi sejak enam dekade terakhir (Mongabay 2023).

Selain terdapat ekspansi termal, terjadinya pencairan gletser dan lapisan es juga menjadi faktor yang mempercepat kenaikan permukaan laut. Gletser atau bongkahan es besar yang terdapat di berbagai belahan dunia mengalami pencairan setiap musim panas berlangsung dan menambah volume air pada laut yang juga

terjadi pada lapisan es seperti yang berlangsung di Greenland maupun Antartika (National Geographic 2023). Frekuensi terjadinya pencairan ini semakin besar karena pemanasan global yang membuat musim panas terjadi lebih sering dan berlangsung lebih lama (National Geographic 2023). Dampak perubahan iklim yang mengancam Bangladesh merupakan bentuk nyata dari ketidakadilan iklim sebagaimana merujuk pada besaran emisi yang dihasilkan di bawah 1% sedangkan Bangladesh menjadi salah satu negara dengan tingkat kerentanan paling tinggi yang disebabkan perubahan iklim (Raju, Boyd, and Otto 2022).

Kenaikan intensitas terjadinya bencana tidak dapat diimbangi oleh seluruh negara karena adanya perbedaan dalam kesiapan maupun kapabilitas menanggapi bencana. Kapabilitas dalam menanggapi bencana oleh suatu negara juga yang menentukan tingkat kerentanan selaras dengan yang dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) yakni *'disaster occurs when hazard meets vulnerability'* (Sampath 2002). Untuk memahami bagaimana kemampuan suatu negara dalam menanggapi bencana dapat berbeda, dibutuhkan analisis terhadap berbagai faktor yang bersifat lokal atau domestik seperti seperti faktor geografis, klimatologi, demografis dan berbagai faktor lainnya. Hal ini juga yang akan diterapkan dalam mengetahui bagaimana krisis kenaikan permukaan laut dapat terjadi di Bangladesh dan menyebabkan dampak yang beragam.

Secara geografis, Bangladesh merupakan negara dataran rendah yang memiliki garis pantai sepanjang 580 km terletak di delta Sungai Gangga (Padma), Brahmaputra (Jamuna), dan Meghna dengan bagian selatan Bangladesh yang berbatasan langsung dengan Teluk Benggala, teluk terbesar di kawasan Asia Selatan (World Bank Group 2021). Letak geografis Bangladesh menjadikan negara

ini termasuk negara dengan wilayah pesisir yang mencakup 32% bagian dan memiliki 800 sungai yang menempati hingga 79% dari wilayah Bangladesh (Billah 2018). Teluk Benggala memiliki rerata kenaikan permukaan laut sebesar 3,4 mm tiap tahunnya yang lebih besar daripada rata-rata global yaitu 2,9 mm (Ashrafuzzaman, Santos, et al. 2022). Hal ini disebabkan aliran pencairan es dari Himalaya menuju Teluk Benggala melalui Sungai Gangga dan Brahmaputra yang menerima lebih dari 10 miliar ton/tahun (Ashrafuzzaman, Santos, et al. 2022). Kenaikan di Teluk Benggala tentunya berimbas terhadap Bangladesh terutama daerah pesisir yang bersinggungan langsung.

Letak geografis Bangladesh yang berada di daratan delta juga membuat penurunan permukaan tanah lebih intens akibat struktur tanah delta yang terbentuk oleh sungai-sungai besar yang mengitari Bangladesh mengalami konsolidasi pengendapan sedimen lepas (Md. A. Islam and Sato 2021). Penurunan permukaan tanah dapat terjadi dalam faktor skala besar juga disebabkan aktivitas manusia seperti pengambilan *groundwater* atau air tanah baik untuk keperluan industri maupun irigasi. Fenomena ini yang kemudian meningkatkan resiko terjadinya banjir, gelombang badai, hingga perubahan garis pantai.

Bila merujuk pada klasifikasi klimatologis, Bangladesh merupakan negara dengan iklim muson tropis yang dipengaruhi sistem siklon tropis dan hujan monsun ditandai dengan curah hujan, kelembaban, dan suhu yang tinggi (Ortiz 1994). Kondisi iklim Bangladesh membentuk pola cuaca yang ekstrim seperti curah hujan dan kelembaban tinggi sepanjang tahun yang menyebabkan banjir di 30% daerahnya (Baten, Arcos González, and Castro Delgado 2018). Selain banjir, angin kencang dari udara maritim selatan hingga barat laut juga sering terjadi dalam

waktu yang lama hingga menyebabkan badai. Pola cuaca di Bangladesh berkontribusi terhadap kenaikan permukaan laut melalui curah hujan yang melimpah dan peningkatan debit sungai terutama di wilayah pesisir (Md. A. Islam and Sato 2021).

Melihat dari faktor demografisnya, populasi Bangladesh pada 2022 telah mencapai 169 juta jiwa dengan peningkatan secara stabil yakni lebih dari 1% tiap tahunnya (Dept 2023). Hal ini menjadi bersifat tidak proporsional bila melihat wilayah Bangladesh yang memiliki luas hanya 148,460 km<sup>2</sup> hingga menjadikan negara ini termasuk dalam peringkat negara yang terpadat di dunia (Statista, n.d.). Meski faktor demografis bukan menjadi faktor yang secara langsung berdampak terhadap kenaikan permukaan laut di Bangladesh, pengaruh demografis tetap perlu diperhitungkan sebab pertambahan penduduk mengartikan adanya peningkatan terhadap mobilitas penduduk. Mobilitas yang dimaksudkan seperti aktivitas industri hingga rumah tangga meningkatkan permintaan energi untuk menopang sejumlah aktivitas seperti pembangkit listrik yang akhirnya menghasilkan lebih banyak gas rumah kaca.

Selain daripada itu, peningkatan populasi juga berpengaruh pada tingkat kerentanan di suatu negara. Bangladesh yang merupakan negara terpadat ke delapan di dunia memiliki permasalahan dalam memberikan tempat tinggal layak yang didukung dengan infrastruktur memadai bagi penduduknya (Correspondent 2019). Pada 2022, tercatat hingga 21 juta penduduk Bangladesh telah melakukan migrasi internal baik didorong atas persoalan peluang kerja hingga iklim yang meningkatkan kerentanan sebagian besar pemukiman di Bangladesh ('Bangladesh', n.d.).

Aktivitas migrasi internal turut berimbas pada lebih masifnya pembangunan infrastruktur yang merubah lanskap dan penggunaan lahan dimana hal ini berisiko dalam mengurangi daya serap tanah ketika terjadi kenaikan air. Urbanisasi yang masif juga meningkatkan jumlah tunawisma di Bangladesh yang telah terdapat lima juta penduduk (Uddin et al. 2021). Selain permasalahan kemiskinan, para tunawisma ini juga kesulitan untuk mendapatkan lahan yang kokoh sebagai tempat tinggal hingga jangka panjang sehingga sebagian besar akan memilih untuk melakukan migrasi internal ('Bangladesh', n.d.). Pemerintah Bangladesh telah mencoba untuk menanggapi permasalahan ini dengan menyediakan lahan tempat tinggal tidak berbayar selama 10 tahun namun masyarakat memilih untuk tidak tinggal di lahan tersebut karena letaknya yang berada di luar tanggul perlindungan sehingga dianggap mengancam keselamatan (Correspondent 2019).

Selain memahami kompleksitas isu krisis kenaikan permukaan laut di Bangladesh melalui analisis terhadap dinamika dan berbagai faktor-faktor yang memperburuk kondisi disana, penting untuk melakukan analisis terhadap dampak dari kenaikan permukaan laut di berbagai sektor untuk memahami lebih dalam implikasi isu yang telah lama berlangsung di Bangladesh ini.

## **2.2 Dampak Krisis Kenaikan Permukaan Laut Terhadap Keamanan Lingkungan di Bangladesh**

Aspek lingkungan merupakan bagian penting dalam menopang stabilitas keamanan di negara. Lingkungan menjadi bagian yang memberdayakan kehidupan setiap makhluk hidup hingga penyeimbang atas ekosistem dan pembangunan pada tata kelola global. Melalui peran penting lingkungan atas tata kelola global



menunjukkan perlunya perlindungan terhadap lingkungan untuk ditingkatkan ditambah jumlah ancaman lingkungan yang semakin banyak. Ancaman lingkungan diartikan sebagai kondisi terjadinya kerusakan atau degradasi terhadap lingkungan yang disebabkan dua faktor besar: faktor alam seperti bencana banjir, kekeringan, hingga kenaikan suhu ekstrim; dan faktor manusia yang merujuk pada aktivitas manusia di bidang industrialisasi, deforestasi, hingga demografi (Mitra et al. 2023). Baik pada peran penting lingkungan dalam penjagaan ekosistem dan penyeimbang kehidupan maupun ancaman yang dapat terjadi pada lingkungan berkaitan dengan konsep dasar ekofeminisme mengenai hubungan konseptual maupun empirisnya yang menyatakan adanya kesamaan peran dan ancaman terhadap perempuan dalam kehidupan (Warren 2000, 24-25).

Pada kasus kenaikan permukaan laut, fenomena ini termasuk dalam ancaman lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam meski tidak lepas dari kontribusi manusia dalam mendorong terjadinya kerusakan. Hal ini ditinjau dari aktivitas manusia yang membuat pelepasan emisi karbon menjadi lebih besar tiap tahunnya seperti yang ditemukan pada aktivitas industri yakni pembakaran bahan bakar fosil, pertanian, hingga deforestasi yang menyebabkan pemanasan global dan akhirnya mendorong kenaikan permukaan laut (NASA, n.d.). Melalui pertimbangan ini, NASA mengemukakan aktivitas manusia bertanggung jawab setidaknya 70% pada kenaikan permukaan laut yang semakin meningkat hingga lebih dari 90% tiap tahunnya ('NASA', n.d.).

Banjir menjadi salah satu dampak paling berisiko yang disebabkan kenaikan permukaan laut dengan terjadinya penggenangan pada lahan basah maupun kering

hingga pengikisan garis pantai yang mengurangi jarak antara ketinggian permukaan laut dan permukaan daratan. Banjir bukanlah bencana yang jarang terjadi di Bangladesh namun kenaikan permukaan laut membuat banjir menjadi tak terkendali dan secara terus menerus terjadi bahkan tidak hanya di waktu cuaca ekstrem berlangsung. Hingga pada 2022, potensi banjir yang semakin intens diperkirakan merugikan lebih dari 60% populasi Bangladesh setiap tahunnya (Lucia Letsch and Elizabeth JZ Robinson, n.d.). Besaran perkiraan cakupan banjir ini selaras dengan letak negara Bangladesh yang sebagian besar adalah dataran rendah. Pada wilayah bagian utara Bangladesh, Rangpur, memiliki iklim wilayah yang didominasi oleh musim muson dan musim panas ditambah dengan sifat tanahnya yang datar membuat hujan maupun arus hilir lebih mudah tergenang sehingga sebesar 62,46% areanya berada di zona risiko banjir sedang hingga tinggi (Rana et al. 2023).

Dampak dari kenaikan permukaan laut tidak hanya memperparah intensitas banjir tetapi juga meningkatkan terjadinya erosi pantai atau abrasi akibat pengikisan daratan dimana kenaikan permukaan laut membawa lebih besar gerusan yang menjangkau lebih jauh ke daerah daratan di pantai dan mendegradasi area daratan di lepas pantai (Leatherman, Zhang, and Douglas 2000). Setiap tahunnya, Bangladesh kehilangan 34 kilometer persegi bagian daratan dan angka ini berpotensi untuk meningkat (Hoang 2023). Dampak kehilangan lahan yang disebabkan kenaikan permukaan laut dapat dilihat pada wilayah bagian tenggara Bangladesh yakni Chittagong terutama di Distrik Noakhali yang menjadi daerah paling terdampak dari kehilangan lahan ini ditunjukkan dari telah hilangnya lahan

dengan lebar lebih dari 10 kilometer karena proses abrasi yang terjadi sangat cepat (Hoang 2023).

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan kenaikan permukaan laut di Bangladesh tidak hanya terlihat dari genangan air dengan volume yang besar dan kehilangan lahan, masyarakat Bangladesh juga harus menghadapi peningkatan salinitas air yang mengganggu sumber daya air bagi aktivitas rumah tangga maupun industrial (Aljazeera 2018). Peningkatan salinitas air merupakan fenomena bertambahnya kadar garam yang terkandung dalam air melalui intrusi air laut atau masuknya air laut ke akuifer melewati batas air laut dan air tanah. Dalam kasus ini, kenaikan permukaan laut menjadi salah satu pendorong air asin bergerak semakin jauh menjangkau daratan hingga ke pasokan sumber daya air di wilayah pesisir maupun kota dan menyebabkan sumber daya air terkontaminasi (Lassiter 2021). Meningkatnya salinitas air menyebabkan akumulasi garam di dalam tanah dan menghambat pertumbuhan tanaman, pola curah hujan serta kelembaban tanah (Ullah, Bano, and Khan 2021).

Area selatan Bangladesh, Distrik Patuakhali, merupakan daerah yang paling terdampak atas peningkatan salinitas air sebab kekayaan ekologi dan kerentanan terhadap variabilitas iklim yang dimilikinya (Arto et al. 2019). Kerugian akibat peningkatan salinitas air ini terasa terutama bagi para petani di Patuakhali yang memanfaatkan air tanah maupun sungai untuk mengairi sawah mereka (Tully et al. 2019). Air yang telah terkontaminasi dengan kadar garam tertentu akan menghambat proses produksi pada agrikultur karena terkonsentrasinya garam pada area akar tanaman mengakibatkan ketidakseimbangan nutrisi dan menurunnya hasil panen termasuk pertumbuhan spesies pohon.

Pada lingkup rumah tangga, kenaikan permukaan laut meningkatkan salinitas air yang mengkontaminasi sumber daya air yang tersedia sehingga kapasitas sumber daya air yang layak untuk keperluan konsumsi turut berkurang. Kontaminasi melalui intrusi air laut terhadap sumber daya air sulit untuk dikendalikan sehingga pelepasan kadar garam dalam jumlah tertentu dapat menimbulkan kelangkaan sumber daya air bagi masyarakat (Jaynes 2024). Fenomena ini sangat membahayakan melihat 97% dari masyarakat Bangladesh memanfaatkan air tanah sebagai sumber daya air untuk konsumsi maupun aktivitas rumah tangga setiap harinya dimana pada 2018 terdapat 49% dari sumber daya air masyarakat Bangladesh telah terkontaminasi (Jaynes 2024).

Berkenaan dengan dampak kenaikan permukaan laut terhadap ekologi terlihat di Sundarbans, hutan bakau dengan luas 10.000 km<sup>2</sup> yang paling besar di dunia juga diprediksi menjadi wilayah yang akan mengalami kerusakan paling parah sebab kerusakan terhadap ekosistem (Ashrafuzzaman, Artemi, et al. 2022). Sundarbans terletak di sepanjang Teluk Benggala yang diprediksi mengalami penggenangan air hingga 75% dari keseluruhan hutan sebab kenaikan permukaan laut yang semakin cepat (Jabir, Hasan, and Anam 2021). Sundarbans menjadi wilayah dengan keanekaragaman spesies hayati antara lain terdapat 334 spesies tanaman termasuk 80 spesies hutan bakau, 49 spesies mamalia, 59 spesies reptil, hingga 230 spesies burung (Rahman and Asaduzzaman 2013).

Meningkatnya permukaan laut menyebabkan terjadi penggenangan air ditambah salinitas air yang mengurangi pasokan air tawar di Sundarbans menyebabkan kerusakan terhadap vegetasi, kesuburan tanah, dan keanekaragaman hayati di dalamnya (Bakermans and Martín, n.d.). Akibatnya, Sundarbans

kehilangan berbagai spesies pohon yang mengurangi stabilitas lahan pesisir karena hilangnya berbagai pohon mangrove yang sebelumnya berfungsi untuk memperkuat struktur daratan untuk tidak mudah terkikis ke lautan (Bakermans and Martín, n.d.). Hal ini berpengaruh dengan fungsi Sundarbans sebagai penghalang alami pasang surut dan angin topan serta penyerapan gelombang badai yang menjadi tidak maksimal.

### **2.3 Dampak Krisis Kenaikan Permukaan Laut Terhadap Sosioekonomi di Bangladesh**

Adanya dampak dari krisis kenaikan permukaan laut di Bangladesh tidak terbatas pada sektor lingkungan dimana sektor sosioekonomi juga menjadi yang melihat kenaikan permukaan laut sebagai tantangan yang besar. Sektor sosioekonomi juga dianggap penting bila melihat adanya hubungan antara perempuan dan lingkungan yang dapat dijelaskan dalam sektor ini menurut ekofeminisme (Warren 2000, 25-26). Secara ekonomi, dampak dari terjadinya krisis permukaan laut dapat ditunjukkan dari berbagai indikator penopang ekonomi seperti pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) setiap tahunnya, tingkat lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur. Sektor ekonomi juga dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi di berbagai zona konsentrasi ekonomi di suatu negara dalam berbagai skenario yang ditimbulkan krisis kenaikan permukaan laut.

Melihat pada indikator pertumbuhan PDB, tingkat pertumbuhan PDB yang ditunjang berbagai sektor di Bangladesh telah mengalami penurunan. Jika dilihat dari persentase kontribusi yang diberikan, pertanian menjadi salah satu sektor yang memiliki peran relatif penting dengan menyumbang PDB hingga 60% dari total

keseluruhan pada masa setelah kemerdekaan (The Daily Star 2021). Bangladesh diperkirakan mengalami resiko hingga USD 300 juta per tahunnya dengan ancaman penyusutan lahan sebesar 18% di area Bangladesh Selatan (Dispatch 2022). Hal ini semakin terlihat dari tren menurunnya kontribusi pertanian terhadap PDB secara drastis seperti yang ditunjukkan pada 2017 yang hanya memiliki kontribusi sebesar 12,96% dan mengalami penurunan berangsur-angsur hingga 11,98% pada 2019 dan merosot hingga 11,22% pada 2022 ('Statista 2022', n.d.).

Adanya penurunan kontribusi bidang pertanian terhadap PDB negara disebabkan berbagai permasalahan seperti pandemi Covid-19 dan perubahan iklim yang mengurangi profitabilitas juga produktivitas aktivitas pertanian ditinjau dari terganggunya sistem yang dioperasikan, sumber daya, hingga kapabilitas tenaga kerja.

Sektor penggerak ekonomi melalui kontribusi pendapatannya seperti bidang agrikultur juga berperan penting terhadap keterserapan tenaga kerja. Pada 2022, agrikultur masih menjadi bidang yang menghasilkan lapangan kerja terbesar yang mencapai 45,33% dari keseluruhan—lebih besar dari empat tahun sebelumnya yang berkisar pada angka 40% (Labour Force Survey 2023). Kontribusi signifikan agrikultur terhadap keterserapan kerja dapat terancam oleh kenaikan permukaan laut yang menghambat sebagian besar aktivitas bidang agrikultur di Bangladesh dan mengancam lebih banyak orang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak sebab sektor ekonomi yang tidak secara efisien memberdayakan lapangan kerja kedepannya karena permasalahan krisis kenaikan permukaan laut yang tak kunjung menemukan penyelesaian.

Selain pada sektor pertanian, industri pariwisata menjadi salah satu sektor yang juga harus diperhatikan dalam permasalahan kenaikan permukaan laut yang dapat mengancam performanya sebagai penopang ekonomi negara. Industri pariwisata sangatlah bergantung pada pola cuaca—dipengaruhi dengan perubahan iklim sehingga diperlukan adaptasi untuk tetap menstabilkan performanya terhadap ekonomi (Ahmed 2019). Performa dari industri pariwisata dalam membantu laju perekonomian dapat melalui kontribusi terhadap PDB negara yang sempat mengalami penurunan pendapatan hingga 44% (World Bank Group 2021). Beberapa objek wisata seperti pantai di Cox's Bazar, Distrik Patuakhali, bagian pesisir Tenggara Bangladesh dan daerah Sundarbans mengalami penurunan kunjungan yang akhirnya berdampak pada rata-rata pendapatannya. Penurunan pendapatan industri pariwisata karena kunjungan dari wisatawan yang stagnan bahkan berkurang disebabkan berbagai hal seperti ancaman bagian lahan yang tergenang, kerusakan properti atau infrastruktur hingga pengikisan daya tarik wisata (Ahmed 2019).

Berkaitan dengan jumlah imigran internal di Bangladesh, adanya kerentanan akibat kenaikan permukaan laut yang secara konsisten berlangsung meningkatkan aktivitas seperti urbanisasi secara intens terjadi. Kenaikan permukaan laut yang merusak infrastruktur seperti jaringan listrik dan akses jalan di berbagai wilayah di Bangladesh mengharuskan masyarakatnya berpindah ke suatu tempat untuk mendapat penghidupan yang lebih baik. Akibatnya, persaingan lapangan kerja, keberlanjutan pendidikan, dan standar hidup turut meningkat namun hanya di suatu wilayah tertentu hingga menciptakan kesenjangan (PreventionWeb 2022).

Selain kesenjangan, adanya beban lebih untuk kembali membangun infrastruktur yang telah rusak di berbagai wilayah terutama wilayah pesisir juga menjadi permasalahan ekonomi akibat kenaikan permukaan laut di Bangladesh. Kerugian terhadap sektor ekonomi yang disebabkan kerusakan pada infrastruktur hingga mencapai USD 23 juta (World Bank Group 2021). Kerusakan terhadap infrastruktur membuat pemerintah Bangladesh harus mengeluarkan lebih besar rencana pembangunan infrastruktur baik untuk pemulihan maupun sebagai langkah mitigasi pada jangka panjang.



## **2.4 Dampak Krisis Kenaikan Permukaan Laut Terhadap Politik di Bangladesh**

Meski permasalahan kenaikan permukaan laut memiliki banyak dampak material, pada sisi lain permasalahan ini juga dapat dianggap sebagai permasalahan yang bersifat politik (Sammler 2020). Hal ini ditinjau dari perwujudan garis pangkal atau batasan yang memotong daratan dan lautan atau garis pantai yang menjadi dasar dari penentuan batas-batas negara seperti yang didefinisikan melalui perjanjian internasional (Sammler 2020). Penentuan batas negara ini menjadi perkara ketika terjadi kenaikan permukaan laut yang melanggar batasan garis pantai yang telah ditentukan hingga diperlukan pengkajian ulang melalui landasan hukum atau perjanjian antar negara yang bersangkutan.

Tidak hanya pada perwujudan batas negara, kenaikan permukaan laut menjadi masalah politis ketika dampaknya mempengaruhi skema politik baik dalam hubungan antar pemerintah dan masyarakat maupun arus politik yang berlangsung. Kenaikan permukaan laut yang mengharuskan bertambahnya pengungsi internal dan disintegrasi wilayah di Bangladesh memicu adanya konflik akan tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat (Relief Web 2023). Isu lingkungan yang membahayakan dan secara berulang terjadi seperti kenaikan permukaan laut menjadi tantangan besar terhadap legitimasi pemerintah yang diukur dalam kemampuan pengelolaan dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya isu ini meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya program yang komprehensif dan efektif dalam menyikapi permasalahan lingkungan yang mengancam keselamatan seluruh masyarakat di Bangladesh dimana hal ini dapat dijustifikasi menggunakan kerangka hukum yang

menempatkan keselamatan masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi pemerintah negara (Relief Web 2023)

Dalam menyikapi permasalahan kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim yang telah merugikan secara historis, pemerintah Bangladesh telah berupaya menyusun berbagai rancangan penanggulangan mulai dari kebijakan dan aksi untuk diimplementasikan sejak pada 2005. Beberapa rancangan kebijakan yang disusun seperti penyusunan Undang-Undang Bangladesh Climate Change Trust Act 2010, Nationally Determined Contributions (NDC), Implementation Roadmap 2018, National Disaster Management Policy 2015 hingga inisiatif yang diperuntukkan jangka panjang seperti National Plan for Disaster Management 2021-2025 dan Bangladesh Delta Plan 2100 (Ministry of Environment, Forest and Climate Change and Government of the People's Republic of Bangladesh, n.d.).

**BAB 3**

**ANALISIS DAMPAK KRISIS KENAIKAN PERMUKAAN LAUT  
TERHADAP PEREMPUAN PADA 2017-2022 MELALUI TEORI  
EKOFEMINISME**

**3.1 Analisis Aspek Feminisme Terhadap Krisis Kenaikan Permukaan Laut di Bangladesh**

Pada skema teori ekofeminisme yang dijelaskan Warren, terdapat aspek feminisme yang mencakup segala isu yang memiliki pengaruh terhadap perempuan maupun manusia lainnya (Warren 2000). Hal ini termasuk klaim Warren mengenai ekofeminisme yang berperan untuk menjelaskan adanya keterkaitan antara ketidakadilan yang dialami perempuan dan makhluk hidup lainnya yang mana analisisnya tidak berhenti pada menjelaskan realitas yang ada maupun mengungkapkan fakta atau temuan terkait namun lebih dari itu yakni mengajukan solusi, strategi, hingga meningkatkan tingkat kesetaraan dalam menanggapi ketidakadilan yang dihadapi (Warren 2000). Pada bagian ini, analisis melalui aspek feminisme akan mencakup pembahasan mengenai kehidupan sosial masyarakat, dinamika hubungan gender, hingga peran pemerintah.

Analisis melalui aspek feminisme dapat dimulai dengan menelaah fokusnya terhadap hubungan gender yang tengah mengalami ketidaksetaraan. Permasalahan ketidaksetaraan gender juga ditemui dalam hubungan sosial masyarakat Bangladesh, seperti yang dimuat dalam The Global Gender Report 2022 oleh WEF dimana Bangladesh berada pada peringkat ke-71, menunjukkan rendahnya keterlibatan negara dalam memperkecil kesenjangan berbasis gender (World

Economic Forum 2022). Tingkat ketidaksetaraan gender di Bangladesh diperkuat dengan budaya patriarki yang telah menjadi tradisi di masyarakat Bangladesh yang berinteraksi melalui sektor ekonomi dengan membuat pembagian kerja berbasis gender yang kaku, tersegregasi, dan menerapkan sistem stratifikasi alih-alih melakukan proses diferensiasi kelas sehingga menempatkan perempuan pada posisi yang lebih berpotensi untuk mengalami penurunan kelas ekonomi sewaktu-waktu (Concern Worldwide 2022).

Pada ranah kehidupan sosial, budaya patriarki di Bangladesh lekat dengan sikap-sikap yang telah mendasari masyarakatnya secara umum dengan adanya dominasi laki-laki, penindasan, eksploitasi terhadap perempuan yang diterima institusi sosialnya (Hossen 2020). Misalnya pada lingkup kecil seperti keluarga yang menempatkan perempuan di posisi terendah dengan tetap dibebani tanggung jawab besar dalam mengurus rumah tangga tanpa diberi kredit atau dianggap gratis (Hossen 2020).

Adanya permasalahan ketidaksetaraan gender yang mempengaruhi kondisi sosio-ekonomi perempuan berpotensi lebih buruk kedepannya saat terjadinya krisis kenaikan permukaan laut. Terjadinya kenaikan permukaan laut secara langsung berdampak pada ketahanan pangan, sanitasi dan air bersih, hingga penghidupan keluarga sebagai beban yang dibawa perempuan di Bangladesh (Tanjeela and Rutherford 2018). Mulai dari keterbatasan perempuan untuk memiliki pendapatan hingga akses pada pendidikan dan pasar tenaga kerja yang adil membuat perempuan lebih rentan pada kemiskinan semakin nyata saat terjadinya krisis oleh dampak ekonomi yang ditimbulkannya.

Saat terjadi kenaikan permukaan laut, sebagian besar daerah di Bangladesh terutama bagian pesisir akan mengalami erosi yang mana mempersulit perempuan untuk memenuhi beban kerja domestiknya seperti untuk mendapatkan air bersih sebagai kebutuhan rumah tangga, perempuan harus berjalan kaki selama satu jam menuju sumber air yang mana tentunya kondisi ini menambah beban kerja perempuan (Bagri 2017). Lebih buruk lagi, bertambahnya beban kerja bagi perempuan di Bangladesh tidak lantas membuat perempuan mendapat kompensasi sebagai bagian dari hak yang layak diterimanya padahal perempuan di Bangladesh bekerja delapan kali lebih banyak khususnya untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan layanan atau jasa ketimbang laki-laki (UNDP 2023). Temuan ini sejalan lurus dengan klaim Warren mengenai cakupan ekofeminisme yang meyakini adanya keterkaitan kuat antara perempuan dan alam melalui pembagian kerja domestik dan ketergantungannya pada alam (Warren 2000, 45).

Pada sisi yang lain, pengaruh yang diberikan tidak hanya datang dari kenaikan permukaan laut terhadap dinamika hubungan gender di masyarakat Bangladesh. Sebaliknya, hubungan gender juga memiliki pengaruh dalam dinamika permasalahan degradasi lingkungan termasuk kenaikan permukaan laut. Salah satu contohnya dapat dilihat dari kegagalan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyelesaikan masalah lingkungan yang telah berlangsung lama karena dinilai hanya menggunakan sensibilitas maskulin dari dominasi laki-laki atau juga disebut hegemoni maskulinitas (Nagel and Lies 2022). Mekanisme ini dianggap tidak efektif karena bergerak secara terbatas dimana fokusnya hanya pada upaya mengatasi masalah yang berlangsung saja tidak pada penyebab terjadinya masalah tersebut sedangkan bila ditinjau lebih lanjut, dominasi laki-laki pada tiap

pola strategis baik konsumsi dan produksi di suatu negara sangat berkaitan dengan dinamika lingkungan (Nagel and Lies 2022). Bila dilakukan dekonstruksi, pola konsumsi dan produksi yang dimaksud mencakup sektor industri seperti bahan bakar fosil telah diisi sebagian besar laki-laki di tiap tingkatan. Selain itu, dominasi laki-laki dilihat dari hilangnya diskursus keadilan iklim dengan mengesampingkan perempuan yang memiliki potensi lebih besar dalam memberikan dimensi kemanusiaan terhadap permasalahan iklim (Nagel and Lies 2022).

Dalam menanggapi kecenderungan memisahkan perempuan dengan isu berkaitan dengan alam, ekofeminisme percaya pendekatan gender yang diberdayakan perempuan pada isu lingkungan sangat berpengaruh terhadap dinamika isu tersebut hingga efektivitas langkah penyelesaiannya. Melalui pengalaman hidup dan pemahaman perempuan yang menunjukkan adanya hubungan filosofis dan praktis yang dimiliki perempuan dengan alam memberikan dampak paralel akan terciptanya masa depan yang lebih humanis dan ekologis (Warren 2000). Masih dari klaim ekofeminisme milik Warren, dalam menanggapi permasalahan kesenjangan gender diperlukan solusi yang dapat mencakup pemahaman feminisme mengenai hubungan perempuan, makhluk hidup, dan alam dengan melibatkan peran perempuan pada langkah yang dilakukan (Warren 2000). Solusi yang dimaksudkan tidak terbatas pada peningkatan peran negara dalam menyelesaikan masalah kesenjangan gender tetapi juga perubahan secara struktural dan kultural. Dalam mewujudkan perubahan secara struktural, negara melalui pemerintah akan melakukan mekanisme sistematis yang menitikberatkan pada unsur-unsur mendasar yang membangun kehidupan di masyarakat.

Pada konteks permasalahan yang terjadi di Bangladesh, kehadiran kebijakan yang berupaya menyelesaikan masalah ini telah tersedia dengan berbagai perkembangan dan penyesuaian terhadap karakterisasi negara tersebut. Pada tingkat pembuatan kebijakan, pemerintah Bangladesh telah menetapkan pada konstitusinya mengenai aturan akan kesetaraan gender bagi masyarakatnya seperti yang tertuang dalam Bagian 3 tentang Hak Dasar Pasal 28 ayat (1) hingga (4) yang menyatakan larangan bagi negara untuk melakukan diskriminasi terhadap warga negaranya atas dasar jenis kelamin, ras, maupun suku dan memastikan adanya hak yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam segala sektor kehidupan serta tidak terdapat larangan untuk negara memberlakukan tindakan afirmatif bagi kelompok marginal yakni perempuan dan anak-anak bila diperuntukkan sebagai upaya memajukan negara (Ministry of Law Bangladesh, n.d.).

Masih pada kebijakan pada tingkat nasional, pemerintah Bangladesh mengeluarkan berbagai program dan rencana jangka panjang dalam menanggapi isu krisis kenaikan permukaan laut seperti National Determined Contribution (NDC) 2015 yang diperbarui pada 2021, National Adaptation Plan (NAP) 2022, dan Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) pada 2009 yang mengalami perkembangan hingga pada 2022 (Ministry of Law Bangladesh, n.d.).

Melalui konstitusi sebagai fundamental dan program BCCSAP sebagai kerangka, pemerintah Bangladesh melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama International Union for Conservation of Nature (IUCN) membentuk Climate Change Gender Action Plan (ccGAP) di Bangladesh yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan gender dan inklusi sosial, melakukan

pembiasaan pada adanya pendekatan gender termasuk meningkatkan partisipasi perempuan pada isu perubahan iklim baik melalui kebijakan, strategi, maupun kontribusi yang diharapkan pembangunan Bangladesh yang lebih adil dan berkelanjutan (Bangladesh Climate Change and Gender Action Plan, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, and Bangladesh 2013). Rencana ini juga sebagai inisiator pembentukan kebijakan setelahnya seperti National Policy for Women's Advancement (NPWA) yang mengadopsi kerangka dari Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) (Bangladesh Climate Change and Gender Action Plan, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, and Bangladesh 2013).

Rencana ccGAP kemudian diimplementasikan pada berbagai sektor dengan tujuan mengakomodir lebih banyak program dan strategi yang dapat membuat langkah adaptasi dan mitigasi lebih inklusif dan setara. Beberapa sektor yang telah terintegrasi antara lain: sektor pangan, manajemen bencana, proteksi sosial dan perlindungan sosial adaptif, kesehatan, serta infrastruktur (Bangladesh Climate Change and Gender Action Plan, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, and Bangladesh 2013). Adapun dari kerja sama yang dibangun, terbentuk berbagai program di Bangladesh baik yang dihasilkan dari kolaborasi kedua sektor maupun yang sebelumnya telah berjalan kemudian dilakukan perkembangan, seperti Agriculture and Food Security Programme (AFSP) yang melakukan pelatihan perkebunan bagi 56.000 perempuan yang tinggal di pesisir, Cyclone Preparedness Programme (CPP) yang mengikutsertakan hingga 16.500 perempuan sebagai relawan, atau inisiasi peningkatan akses pada pendidikan dan pelayanan kesehatan serta pemberdayaan ekonomi oleh Asian



Development Bank (ADB) (Bangladesh Climate Change and Gender Action Plan, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, and Bangladesh 2013).

Adanya integrasi pendekatan gender dan ekologi dalam menanggapi isu-isu terkait merupakan bentuk keselarasan sikap pemangku kekuasaan Bangladesh dengan aspek pertama ekofeminisme yaitu feminisme dimana Warren menegaskan bahwa aspek feminisme dalam ekofeminisme tidak hanya berhenti pada bantuan dan pemberdayaan namun didukung implementasi secara maksimal dengan menggunakan nilai-nilai pada praktiknya dan komitmen terhadap tujuan yang diusung seperti melakukan peningkatan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan (Warren 2000). Meski berbagai sektor di Bangladesh telah mengupayakan integrasi pendekatan gender namun implementasi melalui peningkatan peran perempuan masih menuai banyak kritikan karena baik kebijakan maupun program yang dibentuk kurang memperhatikan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dimana langkah-langkah kebijakan memiliki anggapan yang menempatkan perempuan sebagai korban alih-alih partisipan aktif.

Kurangnya peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan dapat dilihat dari ketidakhadirannya pada lembaga resmi pemerintahan. Seperti pada Kementerian Perempuan dan Anak, Bagian Perempuan, belum melakukan implementasi dari ccGAP dengan program yang ada di bidangnya karena merasa belum memiliki pemahaman akan orientasi dari rencana tersebut (Bangladesh Climate Change and Gender Action Plan, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, and Bangladesh 2013). Pada kementerian lain seperti Kementerian Penanggulangan dan Bantuan Bencana maupun Kementerian

Agrikultur, implementasi ccGAP juga belum secara konsisten dilakukan dan masih pada tahap berupaya untuk memastikan partisipasi perempuan dan laki-laki tidak mengalami disproporsi. Bahkan pada KLHK, belum terdapat pendekatan sistematis termasuk belum adanya mekanisme untuk memantau telah diterapkannya ccGAP. Kesenjangan kebijakan dan implementasinya ini dianggap karena kurangnya sosialisasi mengenai urgensi ccGAP dalam proyek sektoralnya ditambah belum ada dukungan menyeluruh dari pihak yang bertanggung jawab untuk menciptakan sinergi antar sektor.

Permasalahan yang serupa juga ditemukan pada program CPP yang diusung pemerintah Bangladesh bersama Komunitas Bulan Sabit Merah dengan tujuan mengurangi resiko bencana di banyak daerah terutama daerah pesisir di Bangladesh (Tanjeela and Rutherford 2018). Program ini berbasis pada pemberdayaan komunitas dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan tanggap bencana masyarakat pesisir yang rentan terhadap bencana kenaikan permukaan laut. Meski program CPP telah meningkatkan partisipasi perempuan namun CPP menerapkan pembagian tugas yang berdasarkan pada stereotip gender yang membuat perempuan tidak ditempatkan pada bidang vital yang bersinggungan dengan pengambilan keputusan seperti bagian keuangan namun terbatas pada bidang pemberian layanan atau *caring role* (Tanjeela and Rutherford 2018).

Tentunya permasalahan disproporsi partisipasi perempuan dan laki-laki serta penetapan kerja yang diskriminatif menunjukkan kurangnya kesadaran akan tingkat urgensi dalam menerapkan pendekatan yang sejalan dengan ekofeminisme dalam isu alam. Perempuan yang memiliki partisipasi dalam proses pengambilan keputusan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk melindungi sumber daya

alam (SDA) selaras dengan temuan yang menunjukkan perempuan lebih banyak berinvestasi dan memprioritaskan penyelesaian pada isu sosial termasuk pemberdayaan layanan publik (Bove 2021). Hal ini tentunya menunjukkan efektivitas penyelesaian yang dibutuhkan pada isu terkait alam. Efektivitas yang diperoleh dari peran perempuan pada proses pengambilan keputusan juga semakin diperkuat dengan studi yang memperlihatkan negara-negara dengan proporsi perempuan di pemerintahan lebih tinggi menunjukkan kinerja yang lebih baik dimana peran perempuan dalam proses negosiasi dimana perempuan memiliki lebih besar kemungkinan untuk mendapat kerja sama atau perjanjian lingkungan hidup internasional yang akan sangat dibutuhkan pada konteks ini (Norgaard and York 2005).

### **3.2 Analisis Aspek Alam, Ilmu Pengetahuan, Pembangunan, dan Teknologi Terhadap Krisis Kenaikan Permukaan Laut di Bangladesh**

Pada aspek kedua ekofeminisme yaitu aspek alam, ilmu pengetahuan (terutama ekologi), pembangunan, dan teknologi—Warren menjelaskan beberapa urgensi yang mengharuskan adanya elemen-elemen tersebut. Elemen-elemen yang tertuang dalam aspek kedua ekofeminisme ini berjalan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Misalnya, ekofeminisme menginginkan adanya sebuah pembangunan kembali terhadap *ethical position* atau posisi dalam menanggapi isu alam dengan tidak lagi menggunakan karakteristik dari pemikiran yang opresif termasuk patriarki konseptual (Warren 2000). Pembangunan yang diharapkan juga dapat lebih ilmiah dan dapat diproyeksikan melalui teknologi demi menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Secara konsepsi, aspek kedua ekofeminisme yang memiliki elemen ilmu pengetahuan mengharapkan juga adanya lebih banyak pendekatan ilmiah daripada militer yang dianggap lebih opresif. Peneliti menilai dengan partisipasi perempuan pada isu lingkungan, penggunaan ilmu pengetahuan akan lebih besar dan berpotensi membentuk langkah yang lebih strategis (Nagel and Lies 2022). Perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu ekologi dalam ekofeminisme tidak hanya berperan dalam menunjukkan penelitian akan pemahaman bahwa permasalahan devaluasi (baik itu diskriminasi, eksploitasi, maupun penindasan) terhadap perempuan dan alam berakar dari masalah yang sama namun juga menyatakan perlawanan terhadap sistem yang mendominasi saat ini yaitu kapitalisme. Kapitalisme bukanlah akar dari patriarki namun mendukung perkembangannya dengan menerapkannya pada sistem sehingga tercipta sebuah pembangunan yang buruk atau disebut *maldevelopment* oleh pakar ekofeminisme yakni situasi dimana pembangunan yang dianggap produktif atau bernilai hanya yang dapat menghasilkan keuntungan material (Warren 2000). Maka ekofeminisme percaya nilai-nilai opresif seharusnya tidak lagi diterapkan dalam pendekatan penyelesaian masalah gender maupun lingkungan dan memastikan konsep ilmu pengetahuan, pembangunan, dan teknologi yang digunakan dapat membawa kesetaraan sehingga tidak lagi menimbulkan situasi *maldevelopment*. Dalam kasus ini, analisis aspek kedua ekofeminisme akan membahas program yang diinisiasi perempuan di Bangladesh pada bidang ekonomi oleh Khona Khatail Mahila Samity dan Shabolombee Somity juga penerapan konsep ekologi dalam bidang pembangunan.

Pada kasus kenaikan permukaan laut di Bangladesh, program yang menggabungkan ilmu pengetahuan, pembangunan, dan teknologi belum secara

progresif berkembang dengan peran perempuan sebagai bagian dari penggerakannya. Kendati demikian, terdapat beberapa gerakan yang diinisiasi perempuan dan berhasil untuk terorganisir dengan baik dalam berkontribusi memberikan perubahan menanggapi masalah krisis kenaikan permukaan laut di Bangladesh.

Pertama, pada 2018 terdapat Khona Khatail Mahila Samity yakni sebuah perhimpunan di Desa Khona Khatail, Serikat Pankhali, Upazila Dacope, Distrik Khulna yang merupakan area paling terdampak salinitas air akibat kenaikan permukaan laut di Bangladesh (Roy et al. 2022). Khona Khatail Mahila Samity dibentuk oleh perempuan bernama Shila Bawali bersama dengan 16 perempuan lainnya yang kini beranggotakan hingga 45 perempuan dengan tujuan untuk membantu mengatasi dampak dari krisis kenaikan permukaan laut yang berpengaruh pada kualitas air dan sanitasi di Bangladesh (Mallik 2018). Kelompok ini memulai dengan pengumpulan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan pabrik penyaringan air untuk kemudian digunakan oleh 1.300 penduduk di desanya. Selain melakukan pengumpulan dana secara sukarela, kelompok ini melakukan pendekatan pada beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di tingkat lokal maupun global (Farr and Mallik 2019). Upaya ini membuahkan hasil yang ditunjukkan dari dukungan yang diberikan organisasi WaterAid dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) yang bersedia untuk melakukan kolaborasi dan pendanaan untuk pembangunan pabrik tersebut (Mallik 2018). Kontribusi perempuan pada program sanitasi ini tidak hanya berhenti pada pembangunan pabrik dimana Shila mengupayakan program ini dapat terus berjalan dengan menyesuaikan distribusi bantuannya. Program ini memastikan pemakaian air bersih dapat lebih terjangkau daripada penjual komersial lainnya namun

penjualan air bersih dari program ini juga akan tetap dilakukan yang ditujukan bagi para pemilik usaha sehingga distribusi lebih luas dan terdapat pemasukan bagi pengelola program.

Kedua, terdapat pendekatan program pada bidang ekonomi yang juga menerima dampak dari krisis kenaikan permukaan laut terlihat dari beban kerja yang bertambah dan kemiskinan yang lebih parah dialami perempuan terutama yang tinggal di daerah pesisir. Sekelompok perempuan di desa Madrashapara, Kamarpara, dan Baroipara di Jaldhaka Upazila, distrik Nilphamari di Bangladesh Utara yang rentan terhadap perubahan iklim dan kejadian alam ekstrem, termasuk curah hujan lebat, pola curah hujan yang tidak menentu, kabut berlebih, kekeringan, dan banjir bandang yang mengindikasikan dampak langsung perubahan iklim dengan dibantu Shabolombee Somity, sebuah LSM yang didirikan oleh Unnayan Shahojogy Team (UST) membentuk sistem pengelolaan keuangan (Huq, Rahman, and Hossen 2023). Sistem ini berjalan dengan mengajak perempuan baik yang bermukim di daerah pesisir maupun pedesaan Bangladesh untuk menerapkan praktik menabung demi kesiapan finansial ketika bencana seperti kenaikan permukaan laut kembali meningkat. Program ini berkembang pada 2021 dengan tidak membebankan biaya atau pungutan tambahan dari sistem ini dengan harapan perempuan dapat meningkatkan kemampuan mengelola sumber daya keuangannya (Huq, Rahman, and Hossen 2023).

Peninjauan aspek kedua ekofeminisme pada kedua program di atas tidak hanya kehadiran perempuan sebagai inisiator. Adanya kerja sama dengan lembaga yang memiliki kapasitas pada bidang terkait juga menunjukkan penggunaan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang memadai pada dimensi program yang

dijalankan sehingga tidak hanya bergantung pada kapabilitas masyarakat yang masih terbatas. Selain pada praktiknya, konsep pembangunan berkelanjutan yang memiliki peluang untuk terus berjalan seperti dengan memaksimalkan distribusi bantuan yang disesuaikan dengan penerima namun memastikan adanya perputaran sumber daya finansial demi kelangsungan program.

Integrasi *nature-based solution* (Nbs) menjadi salah satu cara dalam mengimplementasikan aspek kedua ekofeminisme ini. Aspek kedua ekofeminisme yang menekankan pada penggunaan ilmu ekologi pada pembangunan yang dapat berkelanjutan dapat ditemukan pada konsep Nbs yang mengharuskan adanya orientasi alam dalam mengambil tindakan yang dapat mengatasi dan melakukan elaborasi akan konsep ekologi restorasi, adaptasi berbasis ekosistem, infrastruktur hijau, dan integrasi pengelolaan wilayah pesisir (Cohen-Shacham et al. 2016).

Dalam konteks Bangladesh, *nature-based solution* bukanlah terminologi yang umum untuk digunakan. Meski demikian, pada kebijakan maupun rencana program dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan telah ditemukan memasukkan berbagai konsep yang dibawah Nbs, seperti Perspective Plan 2021 – 2041 (2020) yang menyoroti adopsi *green tax*, Nationally Determined Contributions (2020) yang memprioritaskan perlindungan wilayah hutan dalam langkah mitigasi, dan Bangladesh Biodiversity Act (2017) yang bertujuan untuk melindungi pengetahuan tradisional mengenai keragaman hayati dan SDA (S. Islam et al. 2021). Tentunya kontribusi Nbs tidak dapat terbatas hanya pada penggunaan konsep yang terkait dalam sejumlah kebijakannya, pemerintah Bangladesh bersama dengan seluruh pihak yang terlibat perlu melakukan implementasi secara komprehensif.

Mengutip dari (S. Islam et al. 2021) yang melakukan analisis mengenai implementasi Nbs di Bangladesh, belum terdapat pedoman implementasi yang praktis ditambah belum adanya dukungan finansial yang memadai dan mekanisme kelembagaan untuk mengawasi sejauh mana implementasi Nbs. Permasalahan integrasi yang tidak secara penuh dilakukan membuat tujuan penyelesaian semakin lambat tercapai meski menggunakan solusi yang dirancang dengan baik.

### **3.3 Analisis Aspek Perspektif Lokal atau Pribumi Terhadap Krisis Kenaikan Permukaan Laut di Bangladesh**

Menarik konsep pada disiplin hubungan internasional, permasalahan alam merupakan bagian dari permasalahan pada lingkup biosfer yang memiliki cakupan luas termasuk hubungan manusia dengan makhluk hidup lainnya dan tidak terbatas pada bagian daratan, udara, maupun lautan membuat permasalahan alam ditarik jauh dalam mencari faktor pendorongnya. Hal ini juga ditemukan dalam studi kasus krisis kenaikan permukaan laut di Bangladesh dimana pemicu utamanya adalah perubahan iklim yang didorong oleh aktivitas manusia bahkan di luar negara Bangladesh itu sendiri. Seringkali dalam mengaitkan isu pada lingkup yang lebih luas, peran internal menjadi tidak dipertimbangkan atau bahkan dipisahkan.

Dalam menanggapi ini, Warren meyakini perspektif lokal atau pribumi yang dapat dilihat sebagai asal mula munculnya suatu budaya maupun sebagai nilai yang diadopsi pada program di era yang lebih modern ini penting untuk memiliki peran yang penempatannya lebih dari objek atau korban dari dampak krisis lingkungan. Perspektif lokal atau pribumi dibutuhkan untuk memastikan telah adanya kesesuaian akan praktik yang dijalankan dengan kekhawatiran akan ancaman yang



dialami penduduk setempat. Ketidakhadiran aspek perspektif lokal atau pribumi pada kebijakan atau praktik yang berkaitan dengan alam justru berpotensi menjadikan praktik tersebut bertolak belakang dengan tujuan awalnya yaitu menyelesaikan permasalahan alam tersebut. Dengan penggunaan perspektif lokal dalam menentukan solusi yang digunakan dalam menanggapi masalah tersebut, kontradiksi nilai akan dapat dihindari.

Hal ini juga dapat menjadi salah satu faktor akan terjadinya ketidaksesuaian dalam pengambilan keputusan baik itu dalam mengimplementasikan suatu kebijakan atau program dalam menanganinya. Sebaliknya, kehadiran aspek perspektif lokal atau pribumi tidak hanya sebagai elemen yang menyeimbangkan namun juga meningkatkan peran dari masyarakat setempat. Warren bercermin pada kasus yang terjadi di India dimana aspirasi dan kekhawatiran perempuan maupun masyarakat setempat justru tidak diakomodir karena tidak lagi dianggap relevan meski masyarakat setempat merupakan pengelola juga memanfaatkan kekayaan alam untuk bertahan (Warren 2000). Analisis aspek ketiga ekofeminisme dalam kasus ini akan membahas mulai dari peran masyarakat lokal di Kotamadya Narsipur, teknik adaptasi masyarakat terhadap bencana alam, dan pemanfaatan SDA oleh masyarakat di Rangamati.

Pada wilayah selatan Bangladesh, tepatnya di Kotamadya Narsipur yang terletak di dekat Distrik Pirojpur, terdapat sebuah pertanian terapung yang dikembangkan oleh masyarakat adatnya (Ho 2022). Rancangan ini merupakan respon dari masyarakat asli yang bermukim di daerah Narsipur sebagai salah satu daerah yang paling terdampak dari krisis kenaikan permukaan laut. Selain karena tingkat kenaikan permukaan laut yang lebih pesat di daerah tersebut, permasalahan

lainnya yang masih berkaitan seperti curah hujan tinggi membuat frekuensi, intensitas, dan luasnya banjir yang datang semakin meningkat sehingga mengakibatkan gagal panen (Ho 2022). Hal ini berdampak langsung pada kehidupan petani yang merupakan sumber pendapatan utama masyarakat adat di Narsipur (Ho 2022).

Menanggapi hal ini, pemindahan tempat tinggal tidak dapat menjadi pilihan bagi masyarakat Narsipur yang telah memiliki keterikatan identitas dan jaringan sosial yang kuat hingga berdekade-dekade bahkan berabad-abad dengan Narsipur (Ho 2022). Masyarakat adat Narsipur lebih memilih untuk melakukan adaptasi yang tentunya membutuhkan penerapan rancangan yang berasal dari pengetahuan mengenai perlindungan lingkungan yang dimilikinya. Sebelumnya rancangan pertanian terapung ini telah ada bahkan sejak 200 tahun yang lalu dan diyakini sebagai warisan leluhur yang masih digunakan hingga saat ini. Rancangan pertanian terapung ini kembali berkembang dengan pesat setelah masyarakat menyadari rancangan ini adalah mekanisme adaptif dan sesuai untuk membantu menyelamatkan sumber pendapatan mereka dari kenaikan permukaan laut yang melanda sebagian besar daerahnya.

Urgensi Warren untuk mengharuskan adanya dimensi perspektif masyarakat lokal juga berasal dari berbagai fenomena yang muncul terkait solusi yang diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Terdapat kecenderungan untuk menggunakan paradigma yang berasal dari negara-negara Barat dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan baik secara kebijakan maupun praktik (Warren 2000). Penggunaan paradigma barat pada kasus negara berkembang seperti Bangladesh cenderung tidak sesuai karena kapabilitas yang

berbeda dan kontradiktif dengan kohesi sosial di masyarakat, paradigma Barat juga cenderung memperkuat budaya kolonialisme dan imperialisme melalui perubahan iklim (Datta and Kairy 2024). Paradigma Barat yang memusatkan pada kebijakan dalam memerangi perubahan iklim saja tidak cukup. Maka diperlukan restrukturisasi adaptasi yang menggabungkan perspektif masyarakat asli, memastikan keselarasan dengan pengetahuan tradisional dan ketahanan masyarakat yang mengadopsinya untuk turut menjaga hak dan kesejahteraan masyarakat asli (Datta and Kairy 2024).

Klaim ekofeminisme terkait urgensi memasukkan perspektif masyarakat lokal ini juga selaras dengan temuan pada fenomena krisis kenaikan permukaan laut yang terjadi di Bangladesh. Pada 2021, terdapat penelitian akan praktik adaptasi terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan laut di daerah pesisir Bangladesh (Amin et al. 2021). Dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwa teknik adaptasi masyarakat asli yang menggunakan perhitungan terstruktur (misalnya: pola tanam tumpang sela dan pengumpulan air hujan) dan praktik pengetahuan masyarakat asli yang menggunakan perhitungan non-struktural (misalnya: perubahan praktik pertanian dan diversifikasi mata pencaharian alternatif) dinilai memainkan peran penting dalam proses adaptasi karena mampu mengurangi potensi kerugian pertanian bahkan meningkatkan ketahanan pangan melalui mekanisme pemulihan sayuran saat terjadi penggenangan air (Amin et al. 2021). Melalui penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknik dan praktik dari masyarakat asli adalah tindakan adaptif yang paling umum dalam menghadapi krisis kenaikan permukaan laut di wilayah pesisir Bangladesh (Amin et al. 2021).

Masih dalam upaya pembentukan manajemen bencana yang komprehensif yang mana dibutuhkan mekanisme pengendalian banjir, peningkatan ketahanan kelompok rentan baik di pedesaan dan perkotaan juga terhadap tantangan lainnya serta diperlukan juga pemahaman terkait adanya perbedaan mengenai tantangan yang dihadapi masyarakat yang membuat penyesuaian upaya dan masalah menjadi elemen yang penting (Datta and Kairy 2024). Hal ini yang dapat juga ditemukan pada studi kasus masyarakat adat Munda di Bangladesh dalam adaptasi terhadap kenaikan permukaan laut. Perlu diketahui adanya kecenderungan sikap yang merupakan budaya yang diwarisi sejak dulu yang mempengaruhi respon terhadap bencana, seperti kesiapsiagaan bencana dan tempat berlindung (Datta and Kairy 2024). Ketika bencana kenaikan permukaan laut datang, masyarakat adat Munda cenderung untuk menetap daripada melakukan migrasi meski pemukiman di daerahnya tidak cukup kuat untuk menjadi tempat perlindungan ketika air telah memasuki wilayahnya. Hal ini disebabkan besarnya hubungan moral dengan daerahnya dan jarak dengan tempat perlindungan yang disediakan pemerintah sulit dijangkau (Datta and Kairy 2024).

Contoh pendekatan lain yang menyoroti pentingnya aspek ketiga ekofeminisme dalam konteks permasalahan kenaikan permukaan laut adalah peran masyarakat di wilayah Rangamati (Garai, Ku, and Zhan 2022). Wilayah Rangamati yang ditempati hingga 52% dari masyarakat adat Bangladesh menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak oleh kenaikan permukaan laut padahal masyarakat ini memiliki ketergantungan terhadap SDA (Garai, Ku, and Zhan 2022). Selama terjadi bencana iklim, masyarakat adat bergantung pada aset lokal untuk beradaptasi mengikuti tradisi budaya mereka mulai dari mengumpulkan buah-

buah, tumbuh-tumbuhan, hingga udang, ikan dan lain-lain dari sungai (Garai, Ku, and Zhan 2022). Selain itu, sifat dari masyarakat adat yang komunal menjadikannya cenderung melakukan kerja sama hingga melakukan ritual dalam komunitas untuk memperkuat ikatan komunalnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan ketahanan dalam menghadapi permasalahan iklim ini (Garai, Ku, and Zhan 2022). Pengembangan secara mandiri dari strategi budaya yang dilakukan masyarakat adat di Bangladesh ini juga perlu mendorong masyarakatnya untuk dapat lebih memahami permasalahan iklim dengan menganalisis arah angin, sifat awan, dan instrumen lainnya. Kasus ini juga menjadi pembuktian pentingnya peran perspektif dari masyarakat lokal atau asli suatu daerah yang mampu menjadi pengamat yang baik alih-alih korban pasif saat terjadinya degradasi lingkungan melalui pengalaman dan hubungan variabilitas, pergeseran, serta tren lingkungan yang telah menjadi bagian integral gaya hidup mereka (Garai, Ku, and Zhan 2022).

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Kenaikan permukaan laut merupakan fenomena yang dihasilkan perubahan iklim ditandai dengan terjadinya peningkatan rata-rata tinggi permukaan laut yang disebabkan oleh pencairan gletser yang menambahkan volume air laut maupun pengembangan laut karena ekspansi termal. Kenaikan permukaan laut merupakan fenomena global yang memberikan dampak beragam pada konteks regional. Bagi negara dataran rendah terutama yang didominasi oleh wilayah pesisir seperti Bangladesh, dampak kenaikan permukaan laut mempengaruhi stabilitas keamanan negaranya bahkan menyebabkan krisis.

Terjadinya fenomena krisis lingkungan di Bangladesh juga berdampak pada kesenjangan gender yang tidak kunjung mengalami penurunan juga pada berbagai sektor lainnya. Mulai dari sektor lingkungan, krisis kenaikan permukaan laut telah menunjukkan degradasi lingkungan yang mengancam keseimbangan ekosistem, peningkatan frekuensi bencana banjir, erosi pantai, hingga salinitas air. Pada sektor ekonomi, dampak dari fenomena ini terlihat dari penurunan profitabilitas dan produktivitas dari bidang industri utama yang menopang PDB Bangladesh, yakni agrikultur dan pariwisata juga dampak kenaikan permukaan laut menurunkan stabilitas keamanan ekonomi dilihat dari persentase keterserapan tenaga kerja yang juga menurun. Selain itu, fenomena ini juga berdampak pada sosial politik mulai dari penentuan batas teritorial negara, disintegrasi wilayah bahkan penurunan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan permasalahan sosial, kesenjangan

gender juga menjadi permasalahan sosial yang secara timbal balik berdampak pada kenaikan permukaan laut.

Dalam meninjau hal ini, penggunaan kerangka pemikiran ekofeminisme yang dikemukakan Karen J. Warren dibutuhkan baik untuk melihat keterkaitan antara kedua pihak hingga menentukan langkah penyelesaian yang dianggap efektif dalam konteks Bangladesh.

**Tabel 1. Ringkasan Aplikasi Teori Ekofeminisme dalam Krisis Kenaikan Permukaan Laut di Bangladesh**

No	Aspek dalam Ekofeminisme	Ringkasan Aplikasi Teori Ekofeminisme dalam Krisis Kenaikan Permukaan Laut di Bangladesh
1	Feminisme	<p><b>Kehidupan sosial masyarakat:</b> Pertama, terdapat budaya patriarki ditunjukkan dari diskriminasi terhadap perempuan. Kedua, tantangan terhadap ketahanan pangan, sanitasi, dan penghidupan keluarga secara keseluruhan yang ditanggung perempuan. Ketiga, keterbatasan akses pada kebutuhan dasar ekonomi dan pendidikan bagi perempuan.</p> <p><b>Dinamika hubungan gender:</b> Pertama, hegemoni maskulinitas dalam penyelesaian degradasi lingkungan yang tidak efektif. Kedua, pemisahan peran perempuan dan isu alam.</p> <p><b>Peran pemerintah:</b> Pertama, penetapan konstitusi sebagai aturan hukum tingkat tertinggi yang tertuang pada Bagian 3 tentang Hak Dasar Pasal 28 ayat (1) hingga (4). Kedua, pembentukan serangkaian inisiatif atau program seperti National Determined Contribution (NDC) 2015 yang diperbarui pada 2021, National Adaptation Plan (NAP) 2022, dan Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) pada 2009 yang mengalami perkembangan hingga pada 2022. Ketiga, kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan (KLHK) bersama International Union for Conservation of Nature (IUCN) dalam penerapan pendekatan gender BCCSAP dan konstitusi sebagai fundamental dalam membentuk Climate Change</p>

		<p>Gender Action Plan (ccGAP). Keempat, pembentukan National Policy for Women's Advancement (NPWA) yang mengadopsi kerangka dari Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women (CEDAW). Serta kelima, himbauan untuk mengadopsi ccGAP pada kementerian-kementerian seperti Kementerian Perempuan dan Anak, Bagian Perempuan, Kementerian Penanggulangan dan Bantuan Bencana, Kementerian Agrikultur, dan KLHK meski sejatinya implementasi belum cukup dilakukan.</p>
2	<p><b>Alam, Ilmu Pengetahuan, Pembangunan dan Teknologi</b></p>	<p><b>Program masyarakat:</b> Pertama, terdapat Khona Khatail Mahila Samity yakni sebuah perhimpunan yang dibentuk oleh perempuan bernama Shila Bawali bersama dengan 16 perempuan lainnya yang beranggotakan hingga 45 perempuan bertujuan mengatasi dampak dari krisis kenaikan permukaan laut yang berfokus pada kualitas air dan sanitasi di Bangladesh dengan pembangunan pabrik pengelola air di desa-desa. Kedua, Shabolombe Somity, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didirikan oleh Unnayan Shahojogy Team (UST) membentuk sistem pengelolaan keuangan bagi ketahanan ekonomi masyarakat.</p> <p><b>Konsep ekologi:</b> Integrasi <i>nature-based solution</i> (Nbs) dalam berbagai kebijakan dan program guna menunjang hadirnya ilmu ekologi pada penyelesaian kenaikan permukaan laut di Bangladesh.</p>
3	<p><b>Perspektif Lokal atau Pribumi Feminisme</b></p>	<p><b>Masyarakat di Kotamadya Narsipur:</b> Masyarakat adat mengembangkan pertanian terapung yakni teknik agrikultur yang merupakan bagian dari warisan masyarakat adat sejak 200 tahun yang lalu.</p> <p><b>Teknik adaptasi bencana:</b> Masyarakat pribumi Bangladesh memiliki warisan teknik adaptasi terhadap bencana alam yang menggunakan perhitungan terstruktur dan praktik pengetahuan masyarakat asli yang menggunakan perhitungan non-struktural.</p> <p><b>Masyarakat di Rangamati:</b> Terdapat kecenderungan dari masyarakat adat Munda yang memilih untuk menetap daripada melakukan migrasi dengan turut melakukan pengembangan secara mandiri dari strategi budaya yang memanfaatkan SDA atau aset lokal.</p>



## 4.2 Rekomendasi

Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yang dapat menjadi rekomendasi objek untuk ditinjau lebih lanjut pada penelitian berikutnya, antara lain:

1. Keterbatasan pada penelitian ini juga ditunjukkan dari jenjang waktu yang terbatas pada lima tahun sedangkan permasalahan kenaikan permukaan laut telah berlangsung sejak lama dan berpotensi untuk kian berlangsung di tahun-tahun berikutnya. Menanggapi permasalahan ini, diharapkan terdapat lebih banyak penelitian yang dapat menyediakan analisis pada kurun waktu yang berbeda maupun mengungkap dari sisi historisnya.
2. Dalam pembahasan terkait penyelesaian permasalahan, terdapat sejumlah langkah yang dilakukan baik pada tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Dalam penelitian ini belum terdapat analisis terperinci mengenai kerja sama yang dilakukan maka diharapkan penelitian selanjutnya juga dapat membahas ragam kerja sama yang telah dilakukan yang ditinjau dari kepentingan politik tiap pihak.
3. Penggunaan kerangka pemikiran ekofeminisme yang mempertajam analisis terhadap bidang-bidang yang tumpang tindih dalam membentuknya, membuat penelitian terbatas pada bidang-bidang tersebut sedangkan permasalahan krisis lingkungan memiliki cakupan yang luas sehingga diharapkan penelitian berikutnya dapat menggunakan kerangka pemikiran lain yang dapat menajamkan analisis pada bidang yang bersinggungan lainnya demi memperkaya temuan akan permasalahan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel Jurnal

- Affandi, Muhammad Luqman Ahmad, Ami Hassan Md Din, and Abd Wahid Rasib. 2022. 'A Short Review on Causes of Sea Level Rise for Climate Monitoring'. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1051 (1): 012003. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1051/1/012003>.
- Ahmed, Mufti Nadimul Quamar, and Shah Md Atiqul Haq. 2019. 'Indigenous People's Perceptions about Climate Change, Forest Resource Management, and Coping Strategies: A Comparative Study in Bangladesh'. *Environment, Development and Sustainability* 21 (April): 1–30. <https://doi.org/10.1007/s10668-017-0055-1>.
- Akter, Simu, Kazi Rifat Ahmed, Andres Marandi, and Christoph Schüth. 2020. 'Possible Factors for Increasing Water Salinity in an Embanked Coastal Island in the Southwest Bengal Delta of Bangladesh'. *Science of The Total Environment* 713 (April): 136668. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.136668>.
- Amin, Md Nurul, Md Asaduzzaman, Alamgir Kabir, Shaila Sharmin Snigdha, and Md Sarwar Hossain. 2021. 'Lessons from Local Indigenous Climate Adaptation Practices: Perceptions and Evidence from Coastal Bangladesh'. *Local Environment* 26 (8): 967–84. <https://doi.org/10.1080/13549839.2021.1937970>.
- Arto, Iñaki, Xaquín García-Muros, Ignacio Cazarro, Mikel González-Eguino, Anil Markandya, and Somnath Hazra. 2019. 'The Socioeconomic Future of Deltas in a Changing Environment'. *Science of The Total Environment* 648 (January): 1284–96. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.08.139>.
- Ashrafuzzaman, Md, Cerdà Artemi, Filipe Duarte Santos, and Luísa Schmidt. 2022. 'Current and Future Salinity Intrusion in the South-Western Coastal Region of Bangladesh'. *Spanish Journal of Soil Science* 12: 10017. <https://doi.org/10.3389/sjss.2022.10017>.
- Ashrafuzzaman, Md., Filipe Duarte Santos, João Miguel Dias, and Artemi Cerdà. 2022. 'Dynamics and Causes of Sea Level Rise in the Coastal Region of Southwest Bangladesh at Global, Regional, and Local Levels'. *Journal of Marine Science and Engineering* 10 (6): 779. <https://doi.org/10.3390/jmse10060779>.
- Astuti, Tri Marhaeni Pudji. 2012. 'EKO FEMINISME DAN PERAN PEREMPUAN DALAM LINGKUNGAN'. *Indonesian Journal of Conservation* 1 (1). <https://doi.org/10.15294/ijc.v1i1.2064>.
- Bakermans, Marja, and William San Martín. n.d. 'Flooding Forests and Farmland: Sea Level Rise in Bangladesh'. Accessed 16 January 2024. <https://pressbooks.pub/extinctionstories/chapter/sea-level-rise-in-bangladesh/>
- Baldwin A., David. 1997. 'The Concept of Security'. *Cambridge University Press* 23 (1): 5–26.
- Bangun, Budi Hermawan. 2020. 'Ecofeminism and Environmental Protection: A Legal Perspective'. *Jambe Law Journal* 3 (1): 1–18. <https://doi.org/10.22437/jlj.3.1.1-18>.
- Baten, Abdul, Pedro Arcos González, and Rafael Castro Delgado. 2018. 'Natural Disasters and Management Systems of Bangladesh from 1972 to 2017: Special Focus on Flood' 8 (December): 35–47.
- Baten, Mohammed Abdul, Lubna Seal, and Kazi Sunzida Lisa. 2015. 'Salinity Intrusion in Interior Coast of Bangladesh: Challenges to Agriculture in South-

- Central Coastal Zone'. *American Journal of Climate Change* 4 (3): 248–62. <https://doi.org/10.4236/ajcc.2015.43020>.
- Batrićević, Ana, and Nikola Paunović. 2019. 'ECOFEMINISM AND ENVIRONMENTAL SECURITY'. *Facta Universitatis, Series: Law and Politics*, September, 125. <https://doi.org/10.22190/FULP1902125B>.
- Billah, Mohammad Maruf. 2018. 'Mapping and Monitoring Erosion-Accretion in an Alluvial River Using Satellite Imagery – The River Bank Changes of the Padma River in Bangladesh'. *Quaestiones Geographicae* 37 (3): 87–95. <https://doi.org/10.2478/quageo-2018-0027>.
- Chakraborty, Rishika, Khalid M. Khan, Daniel T. Dibaba, Md Alfazal Khan, Ali Ahmed, and Mohammad Zahirul Islam. 2019. 'Health Implications of Drinking Water Salinity in Coastal Areas of Bangladesh'. *International Journal of Environmental Research and Public Health* 16 (19). <https://doi.org/10.3390/ijerph16193746>.
- Coric, Dragana. 2014. 'Ecofeminism as a Way of Resolving Some Environmental Issues'. *Zbornik Matice Srpske Za Drustvene Nauke*, no. 148: 551–58. <https://doi.org/10.2298/ZMSDN1448551C>.
- Dasgupta, Susmita, Benoit Laplante, Craig Meisner, David Wheeler, and Jianping Yan. 2009. 'The Impact of Sea Level Rise on Developing Countries: A Comparative Analysis'. *Climatic Change* 93 (3–4): 379–88. <https://doi.org/10.1007/s10584-008-9499-5>.
- Datta, Ranjan, and Barsha Kairy. 2024. 'Decolonizing Climate Change Adaptations from Indigenous Perspectives: Learning Reflections from Munda Indigenous Communities, Coastal Areas in Bangladesh'. *Sustainability* 16 (2): 769. <https://doi.org/10.3390/su16020769>.
- Dept, International Monetary Fund Asia and Pacific. 2023. 'Bangladesh: Requests for an Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility, an Arrangement Under the Extended Credit Facility, and an Arrangement Under the Resilience and Sustainability Facility—World Bank Assessment Letter for the Resilience and Sustainability Facility'. *IMF Staff Country Reports* 2023 (066). <https://doi.org/10.5089/9798400232206.002.A002>.
- Garai, Joydeb, Hok Bun Ku, and Yang Zhan. 2022. 'Climate Change and Cultural Responses of Indigenous People: A Case from Bangladesh'. *Current Research in Environmental Sustainability* 4: 100130. <https://doi.org/10.1016/j.crsust.2022.100130>.
- Glazebrook, Trish. 2002. 'Karen Warren's Ecofeminism'. *Ethics and the Environment* 7 (2): 12–26. <https://www.jstor.org/stable/40339034>.
- Green, Karen. 1994. 'Freud, Wollstonecraft, and Ecofeminism'. *Environmental Ethics* 16 (2): 117–34. <https://doi.org/10.5840/enviroethics199416227>.
- Hasan, Md Kamrul, Lalit Kumar, and Tharani Gopalakrishnan. 2020. 'Inundation Modelling for Bangladeshi Coasts Using Downscaled and Bias-Corrected Temperature'. *Climate Risk Management* 27: 100207. <https://doi.org/10.1016/j.crm.2019.100207>.
- Huq, Hamidul, Md. Mizanur Rahman, and M. Anwar Hossen. 2023. 'Women-Led Climate Change Adaptation: A Study in Northwestern Bangladesh'. *Sustainability* 15 (20): 15041. <https://doi.org/10.3390/su152015041>.

- Iftekhhar, Sayed. 2006. 'Conservation and Management of the Bangladesh Coastal Ecosystem: Overview of an Integrated Approach'. *Natural Resources Forum* 30 (August): 230–37. <https://doi.org/10.1111/j.1477-8947.2006.00111.x>.
- Islam, Md. Anowarul, and Tomonori Sato. 2021. 'Influence of Terrestrial Precipitation on the Variability of Extreme Sea Levels along the Coast of Bangladesh'. *Water* 13 (20): 2915. <https://doi.org/10.3390/w13202915>.
- Islam, Samina, Farah Anzum, Adiba Binte Kamal, Mahmuda Akter, Ali Mohammad Rezaie, and Mizan R. Khan. 2021. 'The Integration of Nature-Based Solutions into Climate Adaptation Policy and Planning in Bangladesh'. *Journal of Science Policy & Governance* 18 (02). <https://doi.org/10.38126/JSPG180204>.
- Jabir, Abdullah-Al, G. M. Jahid Hasan, and Md. Manjurul Anam. 2021. 'Correlation between Temperature, Sea Level Rise and Land Loss: An Assessment along the Sundarbans Coast'. *Journal of King Saud University - Engineering Sciences*, August. <https://doi.org/10.1016/j.jksues.2021.07.012>.
- Khalil, Momtaj Bintay, Brent C. Jacobs, Kylie McKenna, and Natasha Kuruppu. 2020. 'Female Contribution to Grassroots Innovation for Climate Change Adaptation in Bangladesh'. *Climate and Development* 12 (7): 664–76. <https://doi.org/10.1080/17565529.2019.1676188>.
- Khanam, Sabnaj, Mohammad Asadul Haque, Md. Fazlul Hoque, and Md. Tariqul Islam. 2020. 'Assessment of Salinity Level and Some Nutrients in Different Depths of Soil at Kalapara Upazila of Patuakhali District'. *Annual Research & Review in Biology*, December, 1–10. <https://doi.org/10.9734/arrb/2020/v35i1230306>.
- Lassiter, Allison. 2021. 'Rising Seas, Changing Salt Lines, and Drinking Water Salinization'. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, Slow Onset Events related to Climate Change, 50 (June): 208–14. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2021.04.009>.
- Leatherman, Stephen P., Keqi Zhang, and Bruce C. Douglas. 2000a. 'Sea Level Rise Shown to Drive Coastal Erosion'. *Eos, Transactions American Geophysical Union* 81 (6): 55–57. <https://doi.org/10.1029/00EO00034>.
- . 2000b. 'Sea Level Rise Shown to Drive Coastal Erosion'. *Eos, Transactions American Geophysical Union* 81 (6): 55–57. <https://doi.org/10.1029/00EO00034>.
- MacGregor, Sherilyn. 2010. "'Gender and Climate Change": From Impacts to Discourses'. *Journal of the Indian Ocean Region* 6 (2): 223–38. <https://doi.org/10.1080/19480881.2010.536669>.
- Md. Sohrab Hossen. 2020. 'Patriarchy Practice and Women's Subordination in the Society of Bangladesh: An Analytical Review' 2 (3).
- MIMURA, Nobuo. 2013. 'Sea-Level Rise Caused by Climate Change and Its Implications for Society'. *Proceedings of the Japan Academy. Series B, Physical and Biological Sciences* 89 (7): 281–301. <https://doi.org/10.2183/pjab.89.281>.
- Mitra, Bijoy, Syed Masiur Rahman, Mohammed Sakib Uddin, Khaled Mahmud, Md Kamrul Islam, Md Arifuzzaman, M. M. Hafizur Rahman, and Muhammad Muhitur Rahman. 2023. 'Assessing Demographic and Economic Vulnerabilities to Sea Level Rise in Bangladesh via a Nighttime Light-Based Cellular Automata Model'. *Scientific Reports* 13 (1): 13351. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-40329-9>.

- Norgaard, Kari, and Richard York. 2005. 'Gender Equality and State Environmentalism'. *Gender & Society* 19 (4): 506–22. <https://doi.org/10.1177/0891243204273612>.
- Ortiz, Carlos A. Castro. 1994. 'Sea-Level Rise and Its Impact on Bangladesh'. *Ocean & Coastal Management* 23 (3): 249–70. [https://doi.org/10.1016/0964-5691\(94\)90022-1](https://doi.org/10.1016/0964-5691(94)90022-1).
- Pariartha, I. P. Gustave S., Shubham Aggarwal, Srinivas Rallapalli, Prasanna Egodawatta, James McGree, and Ashantha Goonetilleke. 2023. 'Compounding Effects of Urbanization, Climate Change and Sea-Level Rise on Monetary Projections of Flood Damage'. *Journal of Hydrology* 620 (May): 129535. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2023.129535>.
- Prasetyo, Y, N Bashit, B Sasmito, and W Setianingsih. 2019. 'Impact of Land Subsidence and Sea Level Rise Influence Shoreline Change in The Coastal Area of Demak'. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 280 (1): 012006. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/280/1/012006>.
- Rahman, Mr, and M Asaduzzaman. 2013. 'Ecology of Sundarban, Bangladesh'. *Journal of Science Foundation* 8 (1–2): 35–47. <https://doi.org/10.3329/jsf.v8i1-2.14618>.
- Raju, Emmanuel, Emily Boyd, and Friederike Otto. 2022. 'Stop Blaming the Climate for Disasters'. *Communications Earth & Environment* 3 (1): 1–2. <https://doi.org/10.1038/s43247-021-00332-2>.
- Rana, S.M. Sohel, S.M Ahsan Habib, M Nur Hossain Sharifee, Nasrin Sultana, and Syed Hafizur Rahman. 2023. 'Flood Risk Mapping of the Flood-Prone Rangpur Division of Bangladesh Using Remote Sensing and Multi-Criteria Analysis'. *Natural Hazards Research*, September, S266659212300094X. <https://doi.org/10.1016/j.nhres.2023.09.012>.
- Roy, Bishwajit, Gil Pessanha Penha-Lopes, M. Salim Uddin, Md Humayain Kabir, Tiago Capela Lourenço, and Alexandre Torrejano. 2022. 'Sea Level Rise Induced Impacts on Coastal Areas of Bangladesh and Local-Led Community-Based Adaptation'. *International Journal of Disaster Risk Reduction* 73 (April): 102905. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2022.102905>.
- Sammler, Katherine G. 2020. 'The Rising Politics of Sea Level: Demarcating Territory in a Vertically Relative World'. *Territory, Politics, Governance* 8 (5): 604–20. <https://doi.org/10.1080/21622671.2019.1632219>.
- moSuresh, Lavanya. 2021. 'Understanding the Relationship Between Sustainability and Ecofeminism in an Indian Context'. *Journal of Developing Societies* 37 (1): 116–35. <https://doi.org/10.1177/0169796X211001648>.
- Tanjeela, Mumita, and Shannon Rutherford. 2018. 'The Influence of Gender Relations on Women's Involvement and Experience in Climate Change Adaptation Programs in Bangladesh'. *Sage Open* 8 (4): 2158244018812620. <https://doi.org/10.1177/2158244018812620>.
- Tully, Kate, Keryn Gedan, Rebecca Epanchin-Niell, Aaron Strong, Emily S Bernhardt, Todd BenDor, Molly Mitchell, et al. 2019. 'The Invisible Flood: The Chemistry, Ecology, and Social Implications of Coastal Saltwater Intrusion'. *BioScience* 69 (5): 368–78. <https://doi.org/10.1093/biosci/biz027>.
- Ullah, Asad, Asghari Bano, and Naeem Khan. 2021. 'Climate Change and Salinity Effects on Crops and Chemical Communication Between Plants and Plant

- Growth-Promoting Microorganisms Under Stress'. *Frontiers in Sustainable Food Systems* 5 (June): 618092. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2021.618092>.
- Uzzaman, Md. Arfan. 2014. 'Impact of Sea Level Rise in the Coastal Areas of Bangladesh: A Macroeconomic Analysis' 5 (18).
- Wang, Alvin Y. 1999. 'Gender and Nature: A Psychological Analysis of Ecofeminist Theory1'. *Journal of Applied Social Psychology* 29 (11): 2410–24. <https://doi.org/10.1111/j.1559-1816.1999.tb00118.x>.
- Warren, Karen J., and Jim Cheney. 1991. 'Ecological Feminism and Ecosystem Ecology'. *Hypatia* 6 (1): 179–97. <https://www.jstor.org/stable/3810040>.
- Yong, Enn Lun. 2021. 'Understanding the Economic Impacts of Sea-Level Rise on Tourism Prosperity: Conceptualization and Panel Data Evidence'. *Advances in Climate Change Research* 12 (2): 240–53. <https://doi.org/10.1016/j.accre.2021.03.009>.

## Buku

- Ahmed, S M. 2019. *Risks of Climate Change at Coastal Tourism in Bangladesh: A Study on Cox's Bazar*.
- Allison, Juliann Emmons. 2010. 'Ecofeminism and Global Environmental Politics'. In *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.158>.
- Alston, Margaret. 2015. *Women and Climate Change in Bangladesh*. ASAA Women in Asia Series. New York: Routledge.
- Bangladesh Climate Change and Gender Action Plan, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, and Bangladesh, eds. 2013. *Bangladesh Climate Change and Gender Action Plan: ccGAP: Bangladesh*. Dhaka: Ministry of Environment and Forest, Government of the People's Republic of Bangladesh.
- Cohen-Shacham, E., G. Walters, C. Janzen, and S. Maginnis, eds. 2016. *Nature-Based Solutions to Address Global Societal Challenges*. IUCN International Union for Conservation of Nature. <https://doi.org/10.2305/IUCN.CH.2016.13.en>.
- Maurya, P.K., S.A. Ali, A. Ahmad, Q. Zhou, J. Da Silva Castro, E. Khane, and A. Ali. 2020. 'An Introduction to Environmental Degradation: Causes, Consequence and Mitigation'. In *Environmental Degradation: Causes and Remediation Strategies*, 1–20. Agro Environ Media - Agriculture and Environmental Science Academy, Haridwar, India. <https://doi.org/10.26832/aesa-2020-edcrs-01>.
- Mörner, Nils-Axel. 2017. 'Thermal Expansion'. In *Encyclopedia of Coastal Science*, edited by Charles W. Finkl and Christopher Makowski, 1–3. Encyclopedia of Earth Sciences Series. Cham: Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-48657-4\\_375-1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-48657-4_375-1).
- Sarwar, Md Golam. 2013. 'Sea-Level Rise Along the Coast of Bangladesh'. In , 217–31. [https://doi.org/10.1007/978-4-431-54252-0\\_10](https://doi.org/10.1007/978-4-431-54252-0_10).
- Uddin, A S M Shanawaz, Najeebullah Khan, Abu Islam, Mohammad Kamruzzaman, and Shamsuddin Shahid. 2021. *Changes in Urbanization and Urban Heat Island Effect in Dhaka City*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-442136/v1>.

- Warren, Karen. 2000. *Ecofeminist Philosophy: A Western Perspective on What It Is and Why It Matters*. Studies in Social, Political, and Legal Philosophy. Lanham, Md: Rowman & Littlefield.
- Warren, K.J. 2001. 'Feminist Theory: Ecofeminist and Cultural Feminist'. In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 5495–99. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/03949-8>.
- Whyte, Kyle, and Chris Cuomo. 2017. 'Ethics of Caring in Environmental Ethics: Indigenous and Feminist Philosophies'. In *The Oxford Handbook of Environmental Ethics*, edited by Stephen M. Gardiner and Allen Thompson, 0. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199941339.013.22>.

## Laporan

- Asian Development Bank. 2021. 'Bangladesh Climate and Disaster Risk Atlas'. Mandaluyong City, Metro Manila, Philippines: Asian Development Bank.
- Leopold, Till Alexander, Vesselina Ratcheva, and Saadia Zahidi. 2017. *The Global Gender Gap Report 2017*. Geneva, Switzerland: World Economic Forum.
- The Global Economy. 2023. 'Bangladesh: Female Labor Force Participation'. The Global Economy. 2023. "Bangladesh Female Labor Force Participation - Data, Chart." n.d. [TheGlobalEconomy.com](https://www.theglobaleconomy.com/Bangladesh/Female_labor_force_participation/). Accessed March 30, 2023.
- The Global Gender Gap Report 2018*. 2018. Geneva, Switzerland: World Economic Forum.
- The Global Gender Gap Report 2020*. 2019. Geneva, Switzerland: World Economic Forum.
- The Global Gender Gap Report 2021*. 2021. Geneva, Switzerland: World Economic Forum.
- The Global Gender Gap Report 2022*. 2022. Geneva, Switzerland: World Economic Forum.
- United Nations Development Programme. 1994. 'Human Development Report'. New York: Oxford University Press. <https://hdr.undp.org/>.
- World Bank Group. 2021. 'CLIMATE RISK COUNTRY PROFILE: BANGLADESH'. Country Profile. Washington DC. [https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/country-profiles/15502-WB\\_Bangladesh%20Country%20Profile-WEB.pdf](https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/country-profiles/15502-WB_Bangladesh%20Country%20Profile-WEB.pdf).

## Artikel Daring

- '2017 State of the Climate: Sea Level | NOAA Climate.Gov'. n.d. Accessed 13 March 2024. <http://www.climate.gov/news-features/featured-images/2017-state-climate-sea-level>.
- 'Agriculture in Bangladesh: The last and the next fifty years'. 2021. The Daily Star. 26 March 2021. <https://www.thedailystar.net/supplements/celebrating-50-years->

- [bangladesh/news/agriculture-bangladesh-the-last-and-the-next-fifty-years-2066689](#).
- Aljazeera. 2018. 'In Pictures: Bangladeshi Farmers Adapt as Climate Crisis Worsens'. 28 October 2018. <https://www.aljazeera.com/gallery/2021/10/28/bangladesh-farmers-climate-crisis-rising-sea-levels-agriculture>.
- Bagri, Neha Thirani. 2017. 'Bangladesh's Water Crisis: A Story of Gender'. Aljazeera. 25 April 2017. <https://www.aljazeera.com/features/2017/4/25/bangladeshs-water-crisis-a-story-of-gender>.
- 'Bangladesh: Climate Impacts, Inequalities and Indigenous Peoples | PreventionWeb'. 2022. 18 August 2022. <https://www.preventionweb.net/news/impacts-human-induced-climate-change-are-exacerbating-social-and-economic-inequalities>.
- 'Bangladesh: Rising Salinity Threatens "the Wealth of the World" | PreventionWeb'. 2022. 8 August 2022. <https://www.preventionweb.net/news/rising-salinity-threatens-wealth-world-bangladesh>.
- Bove, Tristan. 2021. 'Ecofeminism: Where Gender and Climate Change Intersect'. Earth.Org. 19 July 2021. <https://earth.org/ecofeminism/>.
- Concern Worldwide. 2022. 'Gender Inequality in Bangladesh: Engaging Men and Boys to Close the Gap'. Concern Worldwide. 28 February 2022. <https://www.concern.net/news/gender-inequality-in-bangladesh-closing-the-gap>.
- Correspondent, Staff. 2019. '5m homeless, 74 pc of the population live in mud houses'. Prothomalo. 8 November 2019. <https://en.prothomalo.com/bangladesh/5m-homeless-74-pc-of-the-population-live-in-mud>.
- David Eckstein, Sönke Kreft. 2016. 'Global Climate Risk Index 2017 | Germanwatch e.V.'. 1 November 2016. <https://www.germanwatch.org/en/12978>.
- 'Development and Importance of Tourism for Bangladesh'. n.d. Worlddata.Info. Accessed 22 January 2024. <https://www.worlddata.info/asia/bangladesh/tourism.php>.
- Dewi, Karina Utami, and Masitoh Nur Rohma. 2023. 'Mpu Uteun: kelompok perempuan pelindung hutan Aceh yang melawan patriarki'. The Conversation. 19 April 2023. <http://theconversation.com/mpu-uteun-kelompok-perempuan-pelindung-hutan-aceh-yang-melawan-patriarki-203681>.
- Economist. n.d. 'Gender inequality and climate change are not separate challenges'. Accessed 12 March 2024. <https://impact.economist.com/sustainability/social-sustainability/gender-inequality-and-climate-change-are-not-separate-challenges>.
- Farr, Jonathan, and Samia Mallik. 2019. 'Women Take the Lead Tackling Climate Change in Bangladesh - Bangladesh | ReliefWeb'. 15 March 2019. <https://reliefweb.int/report/bangladesh/women-take-lead-tackling-climate-change-bangladesh>.
- 'Global Climate Change and Local Land Subsidence Exacerbate Inundation Risk to the San Francisco Bay Area | Science Advances'. n.d. Accessed 19 December 2023. <https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aap9234>.
- Harris, Gardiner. 2014. 'Facing Rising Seas, Bangladesh Confronts the Consequences of Climate Change'. The New York Times. 28 March 2014. <https://www.nytimes.com/2014/03/29/world/asia/facing-rising-seas-bangladesh-confronts-the-consequences-of-climate-change.html>.
- Ho, Wing Ka. 2022a. 'The Looming Threat of Sea Level Rise in Bangladesh'. Earth.Org. 14 July 2022. <https://earth.org/sea-level-rise-in-bangladesh/>.



- . 2022b. ‘The Role of Indigenous Knowledge in Climate Change Adaptation In Bangladesh and the Philippines’. Earth.Org. 22 December 2022. <https://earth.org/indigenous-knowledge/>.
- Hoang, Long. 2023. ‘Loose and Gain: Coastal Erosion in Bangladesh’. TheWaterChannel. 22 March 2023. <https://thewaterchannel.tv/thewaterblog/loose-and-gain-coastal-erosion-in-bangladesh/>.
- Hossen, Md Sohrab. 2020. ‘Patriarchy Practice and Women’s Subordination in the Society of Bangladesh: An Analytical Review’. SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY. <https://papers.ssrn.com/abstract=3670335>.
- ‘How Much Do Human Activities Contribute to Sea-Level Rise?’ n.d. NASA Sea Level Change Portal. Accessed 4 January 2024. <https://sealevel.nasa.gov/faq/14/how-much-do-human-activities-contribute-to-sea-level-rise>.
- ‘In Bangladesh, "the most vulnerable face the full force of climate change"’. n.d. Emmaüs International. Accessed 13 January 2024. <https://www.emmaus-international.org/en/news/in-bangladesh-the-most-vulnerable-face-the-full-force-of-climate-change/>.
- Jaynes, Cristen Hemingway. 2024. ‘Arsenic in Bangladesh Drinking Water to Rise With Sea Levels’. EcoWatch. 18 January 2024. <https://www.ecowatch.com/arsenic-bangladesh-drinking-water-sea-level-rise.html>.
- ‘Labour Force Survey 2022: Agriculture still main job generator’. 2023. The Daily Star. 30 March 2023. <https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/news/labour-force-survey-2022-agriculture-still-main-job-generator-3283936>.
- Lindsey, Rebecca. 2022. ‘Climate Change: Global Sea Level’. Climate.Gov. 19 April 2022. <https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-sea-level>.
- Lucia Letsch and Elizabeth JZ Robinson. n.d. ‘Tackling Flooding in Bangladesh in a Changing Climate’. Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment and the Centre for Climate Change Economics and Policy.
- Mallik, Samia. 2018. ‘Women’s Fight on the Climate Front’. The Financial Express. 2018. <https://thefinancialexpress.com.bd/views/analysis/womens-fight-on-the-climate-front-1544800638>.
- Ministry of Environment and Forests. n.d. ‘CLIMATE CHANGE AND TOURISM INDUSTRY IN BANGLADESH’. International Union for Conservation of Nature. <https://www.iucn.org/sites/default/files/import/downloads/tourism.pdf>.
- Ministry of Environment, Forest and Climate Change and Government of the People’s Republic of Bangladesh. n.d. ‘Climate Change Initiatives of Bangladesh: Achieving Climate Resilience’. In .
- Mongabay. 2023. ‘“Alarming” Heat Wave Threatens Bangladesh’s People and Their Food Supply’. Mongabay Environmental News. 28 April 2023. <https://news.mongabay.com/2023/04/alarming-heat-wave-threatens-bangladeshs-people-and-their-food-supply/>.
- ‘More Attention Needed for the Agriculture Sector | The Daily Star’. n.d. Accessed 26 December 2023. <https://www.thedailystar.net/supplements/32nd-anniversary/towards-smart-bangladesh/news/more-attention-needed-the-agriculture-sector-3243586>.

- Nagel, Joane, and Trevor Scott Lies. 2022. 'Re-Gendering Climate Change: Men and Masculinity in Climate Research, Policy, and Practice'. *Frontiers in Climate* 4. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fclim.2022.856869>.
- NASA. n.d. 'Understanding Sea Level'. SEA LEVEL CHANGE. <https://sealevel.nasa.gov/understanding-sea-level/overview>.
- 'NASA Sea Level Change Portal: Subsidence'. n.d. NASA Sea Level Change Portal. Accessed 23 December 2023. <https://sealevel.nasa.gov/understanding-sea-level/regional-sea-level/subsidence>.
- 'NASA Sea Level Change Portal: Thermal Expansion'. n.d. NASA Sea Level Change Portal. Accessed 19 December 2023. <https://sealevel.nasa.gov/understanding-sea-level/global-sea-level/thermal-expansion>.
- National Geographic. 2023. 'Sea Level Rise, Facts and Information'. Environment. 10 April 2023. <https://www.nationalgeographic.com/environment/article/sea-level-rise-1>.
- Nations, United. n.d. 'Generating Power'. United Nations. United Nations. Accessed 16 January 2024. <https://www.un.org/en/climatechange/climate-solutions/cities-pollution>.
- NCBI. n.d. 'Health Implications of Drinking Water Salinity in Coastal Areas of Bangladesh - PMC'. Accessed 20 January 2024. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6801928/>.
- NRDC. 2018. 'Bangladesh: A Country Underwater, a Culture on the Move'. 13 September 2018. <https://www.nrdc.org/stories/bangladesh-country-underwater-culture-move>.
- 'On the front line of climate change in India's Sundarbans'. 2019. Mongabay Environmental News. 17 October 2019. <https://news.mongabay.com/2019/10/sundarbans-climate-change-tigers-india/>.
- Pratiwi, Andi Misbahul. 2023. 'Climate Crisis Worsens Gender Inequality in Coastal Communities | PreventionWeb'. 6 November 2023. <https://www.preventionweb.net/news/climate-crisis-making-gender-inequality-developing-coastal-communities-worse>.
- 'Rangpur, Bangladesh Flood Map: Elevation Map, Sea Level Rise Map'. n.d. Accessed 18 January 2024. <https://www.floodmap.net/?gi=1185188>.
- Relief Web. 2017. '2017 Is Set to Be in Top Three Hottest Years, with Record-Breaking Extreme Weather - World | ReliefWeb'. 8 November 2017. <https://reliefweb.int/report/world/2017-set-be-top-three-hottest-years-record-breaking-extreme-weather>.
- Rezwana. 2022. 'Rising Sea Levels in Bangladesh Are Driving Women to Take the Pill to Stop Menstruating'. GlobalVoices. 17 August 2022. <https://globalvoices.org/2022/08/17/rising-sea-levels-in-bangladesh-are-driving-women-to-take-the-pill-to-stop-menstruating/>.
- Sampath, Gayan. 2002. 'DISASTERS & EMERGENCIES DEFINITIONS Training Package'. 2002. [https://www.academia.edu/32677664/DISASTERS\\_and\\_EMERGENCIES\\_DEFINITIONS\\_Training\\_Package](https://www.academia.edu/32677664/DISASTERS_and_EMERGENCIES_DEFINITIONS_Training_Package).
- 'Sea level rise'. n.d. Understanding Global Change. Accessed 4 January 2024. <https://ugc.berkeley.edu/background-content/sea-level-rise/>.
- Seraj, Shykh. 2022. 'Role of Agriculture in Bangladesh's Economic Growth'. The Daily Star. 13 February 2022. <https://www.thedailystar.net/recovering-covid>.

- [reinventing-our-future/blueprint-brighter-tomorrow/news/role-agriculture-bangladeshs-economic-growth-2960736](#).
- Sima, Richard J. 2021. 'Rising Sea Levels Bring a Tidal Change to Tourism'. Eos. 22 April 2021. <http://eos.org/geofizz/rising-sea-levels-bring-a-tidal-change-to-tourism>.
- Statista. 2022. 'Bangladesh - Share of Economic Sectors in the Gross Domestic Product 2022'. Statista. 2022. <https://www.statista.com/statistics/438359/share-of-economic-sectors-in-the-gdp-in-bangladesh/>.
- . n.d. 'Bangladesh - Total Population 2018-2028'. Statista. Accessed 13 January 2024. <https://www.statista.com/statistics/438167/total-population-of-bangladesh/>.
- 'Stressing Rising Seas Already Creating Instability, Conflict, Secretary-General Says Security Council Has Critical Role in Addressing Devastating Challenges - World | ReliefWeb'. 2023. 14 February 2023. <https://reliefweb.int/report/world/stressing-rising-seas-already-creating-instability-conflict-secretary-general-says-security-council-has-critical-role-addressing-devastating-challenges>.
- 'The Constitution of the People's Republic of Bangladesh | 28. Discrimination on Grounds of Religion, Etc.' n.d. Accessed 13 March 2024. <http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-367/section-24576.html>.
- The Daily Star. 2017. 'Bangladesh 6th Worst Extreme Weather-Affected Country'. 2017. <https://www.thedailystar.net/environment/bangladesh-6th-worst-extreme-weather-affected-country-global-climate-change-risk-index-2017-1418197>.
- 'The Nature Conservancy: A World Where People & Nature Thrive'. n.d. Accessed 22 January 2024. <https://www.nature.org/en-us/>.
- UN Women. 2022. 'Explainer: How Gender Inequality and Climate Change Are Interconnected'. UN Women – Headquarters. 28 February 2022. <https://www.unwomen.org/en/news-stories/explainer/2022/02/explainer-how-gender-inequality-and-climate-change-are-interconnected>.
- UNDP. 2023. 'Over 99 percent of Bangladeshis hold at least one bias against women'. UNDP. 2023. <https://www.undp.org/bangladesh/blog/over-99-percent-bangladeshis-hold-least-one-bias-against-women>.
- . n.d. 'Bangladesh | United Nations Development Programme'. Accessed 16 January 2024. <https://www.undp.org/bangladesh>.
- UNHCR. n.d. 'Bangladesh'. Global Focus. Accessed 16 January 2024. <https://reporting.unhcr.org/operational/operations/bangladesh>.
- US EPA, OAR. 2016. 'Climate Change Indicators: Coastal Flooding'. Reports and Assessments. 1 July 2016. <https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-coastal-flooding>.
- weatheronline.co.uk. n.d. 'Climate of the World: Bangladesh | Weatheronline.Co.Uk'. Accessed 13 January 2024. <https://www.weatheronline.co.uk/reports/climate/Bangladesh.htm>.
- Welden, Emma Annabelle. 2019. 'Women, Climate, and Sea Level Rise: An Ecofeminist Approach to Move Above the Surface of Soft Law Stagnation'. In . Canada. <https://theieca.org/coce2019>.
- World Bank. n.d. 'Bangladesh - Unemployment Rate 1999 to 2022 | Statista'. Accessed 22 January 2024. <https://www.statista.com/statistics/808225/unemployment-rate-in-bangladesh/>.
- 'World Bank Climate Change Knowledge Portal'. n.d. Accessed 13 January 2024. <https://climateknowledgeportal.worldbank.org/>.

‘World Bank Open Data’. n.d. World Bank Open Data. Accessed 26 December 2023.  
<https://data.worldbank.org>.